



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025-2029

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



(0281) 640359



@dinperkim.banyumaskab



dinperkim.banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, guna menjamin sinergi dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Renstra ini disusun sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang perumahan, pertanahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, dokumen ini juga memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi acuan strategis bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal selama 5 (lima) tahun ke depan.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Purwokerto, September 2025

Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Salto Suprabowo, S.T
Perumahan Muda (IV/c)
NIP 196911231997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR..... vi

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum3

1.3. Maksud dan Tujuan6

1.3.1. Maksud.....6

1.3.2. Tujuan.....6

1.4. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II8

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN8

DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH8

2.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman8

2.2. Urusan Pertanahan 15

2.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINPERKIM Kab. Banyumas..... 15

2.3.1. Tugas..... 16

2.3.2. Fungsi 16

2.3.3. Struktur Organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas 16

2.3.4. Uraian Tugas 17

2.4. Sumber Daya DINPERKIM Kabupaten Banyumas24

2.4.1. Sumber Daya Manusia.....25

2.4.2. Sarana dan Prasarana (Aset)26

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis DINPERKIM 52

2.5.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINPERKIM Kabupaten Banyumas..... 52

2.5.2. Telaah Isu Permasalahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .55

2.5.3. Telaah Isu Permasalahan Provinsi dan Nasional 55

2.5.4. Telaah Standar Pelayanan Minimal (SPM) 56

2.5.5. Telaahan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih..... 57

2.5.6. Penentuan Isu – Isu Strategis DINPERKIM Kab. Banyumas 58

BAB III 62

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN..... 62

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPERKIM Kab. Banyumas 62

3.1.1. Tujuan..... 62

3.1.2. Sasaran 62

3.2. Strategi 65

3.3. Arah Kebijakan 66

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 71

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 71

BAB V 102

PENUTUP..... 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024 10

Tabel 2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) DINPERKIM Kabupaten Banyumas..... 13

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DINPERKIM Kab. Banyumas 17

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas 25

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas 26

Berdasarkan Golongan Tahun 2025 26

Tabel 2.5 Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025 27

Tabel 2. 6 Daftar Inventaris Bangunan Gedung DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025 44

Tabel 2.7 Rekapitulasi Realisasi Penanganan RTLH..... 53

Tabel 2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis DINPERKIM berdasarkan telaah Isu KLHS, Provinsi, Nasional, serta Isu Global (SDG’s) 60

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 64

Tabel 3.2 Strategi dan Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPERKIM Kab. Banyumas Tahun 2025-2029 65

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan..... 66

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DINPERKIM Kab. Banyumas 75

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan serta Pendanaan DINPERKIM Kab. Banyumas periode 2025 – 2030 88

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama DINPERKIM Kab. Banyumas 2025-2030 99

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci DINPERKIM Kab. Banyumas Tahun 2025 -2030 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah2

Gambar 1.2 Gambar Alur Keterhubungan Renstra dengan Renja3

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DINPERKIM Kab. Banyumas..... 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk mengoptimalkan potensi daerah serta memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak secara nasional pada tahun 2024. Seiring telah terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Banyumas, pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

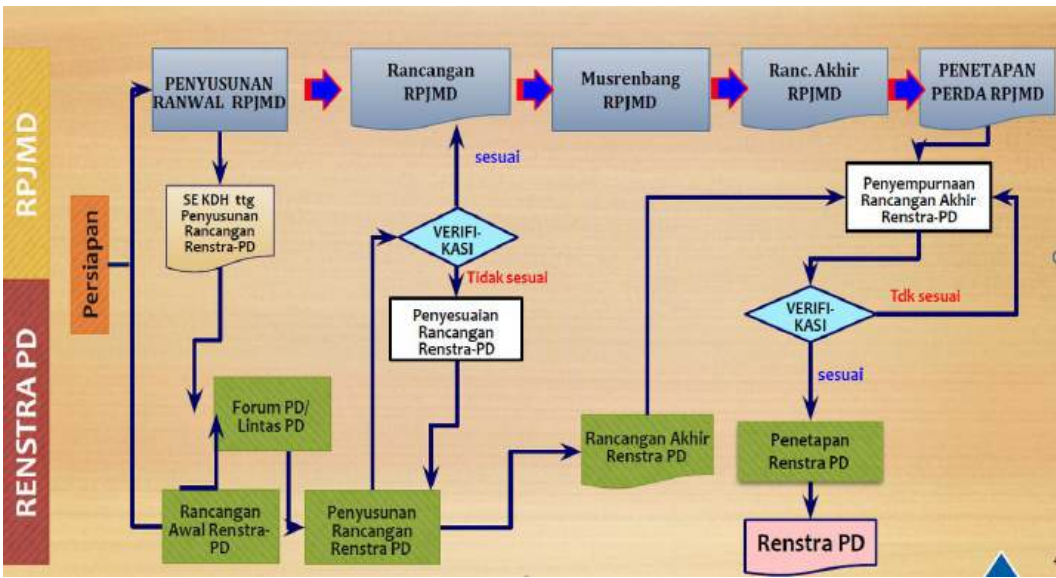
RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2045 serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk segera menyusun RPJMD Tahun 2025–2029 yang selaras dengan RPJPD 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Selanjutnya, seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) secara paralel dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra tersebut tidak hanya mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas, tetapi juga memperhatikan Renstra Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah lima tahunan yang berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Renstra ini disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, Renstra Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Provinsi Jawa Tengah.

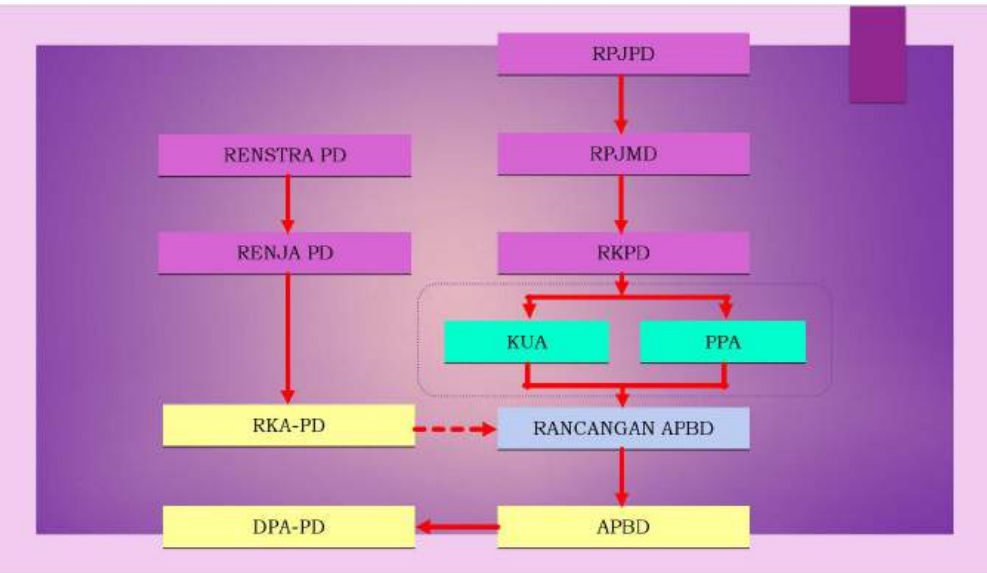
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 meliputi tahap persiapan, penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir hingga penetapan Renstra, yang dilaksanakan secara terpadu dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam program tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Gambar Alur Keterhubungan Renstra dengan Renja

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bagian dari dokumen perencanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas selama periode tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah, serta antar dokumen perencanaan perangkat daerah, guna menjamin kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 12. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
 21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 23);
 22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 37);
 23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 23);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 disusun sebagai gambaran kinerja, permasalahan, dan isu strategis, serta memuat strategi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas selama periode 2025–2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah selama periode Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas

sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Bab II Gambar Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat uraian mengenai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja pada periode sebelumnya, serta identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang memengaruhi kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, strategi pencapaiannya, serta arah kebijakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja, target capaian, dan alokasi sumber daya, yang disusun secara sistematis untuk menjamin keterpaduan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan dokumen Renstra serta arahan umum mengenai implementasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Renstra selama periode 2025–2029 dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Kabupaten Banyumas, urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Ruang lingkup urusan ini meliputi penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), serta pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Kabupaten Banyumas masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain kualitas rumah layak huni, keberadaan kawasan permukiman kumuh, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman seperti jalan lingkungan dan drainase. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di wilayah perkotaan meningkatkan kebutuhan akan perumahan yang terjangkau dan berkualitas. Oleh karena itu, penanganan perumahan dan kawasan permukiman menjadi prioritas pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) terus melakukan perencanaan dan pelaksanaan program strategis yang didukung oleh APBD, pemerintah pusat, serta mitra pembangunan lainnya. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang terintegrasi dengan tata ruang wilayah. Melalui intervensi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat mendukung terwujudnya lingkungan hunian yang sehat, layak, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas.

Selama lima tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren yang bervariasi dan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kinerja pelayanan publik.

Terdapat sejumlah perubahan antara Renstra Awal Tahun 2018–2023 dan Renstra Perubahan Tahun 2021 sebagai dampak penyesuaian nomenklatur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021, sehingga beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu disesuaikan. Selain itu, pada penyusunan Renstra Transisi Periode 2024–2026 juga dilakukan penyesuaian dalam perumusan IKU dengan mempertimbangkan penerapan metode SMART, yang menyebabkan adanya dinamika pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

Evaluasi ini menjadi landasan penting dalam perumusan strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) untuk periode 2025–2029 agar lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya disajikan tabel Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2023 serta hasil evaluasi Renstra Transisi Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2020–2024

NO	INDIKATOR					SAT	REALISASI TAHUN									
	RENSTRA AWAL		RENSTRA PERUBAHAN		RPD 2024-2026		2020		2021		2022		2023		2024	
							T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni					%	85,17	85,2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Permukiman yang Tertata					%	9,45	9,32	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar					%	76,81	78,76	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang			%	99,982	99,982	99,983	99,983	99,984	99,984	99,985	99,985		
5	Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	2	Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang			%	0,018	0,018	0,017	0,017	0,016	0,016	0,015	0,015		
		3	Persentase Kinerja Infrastruktur Pendukung Perumahan dan Kawasan Permukiman			%	-	-	73,8	75,99	74,96	76,45	76,19	76,92		
		4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni			%	-	-	-	-	77,73	79,39	77,58	79,8		
		5	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana			%	-	-	-	-	100	100	100	100		
				1	Persentase peningkatan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.144	0,069

NO	INDIKATOR					SAT	REALISASI TAHUN									
	RENSTRA AWAL		RENSTRA PERUBAHAN		RPD 2024-2026		2020		2021		2022		2023		2024	
							T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
				2	Rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Angka	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7548	0,7071
				3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
				4	Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
				5	Prosentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum	%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1,94
				6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Domestik	%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,24

Berdasarkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Banyumas selama lima tahun terakhir, kinerja perangkat daerah menunjukkan capaian yang relatif stabil dan progresif pada beberapa aspek, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada indikator tertentu.

Secara umum, indikator persentase lingkungan permukiman layak huni, permukiman tertata, dan rumah sehat sesuai standar menunjukkan realisasi yang cukup baik meskipun belum dilaporkan secara konsisten setiap tahun. Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mampu dipertahankan di atas 99% selama lima tahun berturut-turut, yang mencerminkan komitmen tinggi terhadap tata kelola ruang wilayah. Sementara itu, indikator penurunan pelanggaran tata ruang menunjukkan perbaikan yang konsisten dari 0,018% pada tahun 2020 menjadi 0,015% pada tahun 2023 dan 2024.

Capaian positif juga terlihat pada indikator-indikator baru, seperti cakupan ketersediaan rumah layak huni yang meningkat dari 77,73% pada tahun 2021 menjadi 79,8% pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh adanya sumber pendanaan di luar APBD, antara lain bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta kontribusi CSR. Selain itu, penanganan rumah layak huni bagi korban bencana berhasil dipertahankan pada capaian 100% selama empat tahun berturut-turut. Namun demikian, beberapa indikator, seperti rasio rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan rumah tangga dengan akses air limbah domestik, masih menunjukkan fluktuasi sehingga memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas ke depan agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan permukiman yang layak dan tertata.

Selanjutnya, untuk menilai capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas secara lebih spesifik, dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK digunakan untuk mengukur hasil strategis pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan. Uraian IKK Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) DINPERKIM Kabupaten Banyumas

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	S A T	2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase Luas Tanah Milik Pemkab yang Bersertifikat	%	38,51	50,33	38,83	50,97	39,16	50,97	39,47	53,21		
2	Persentase tanah yang tertata	%									100	100
3	Persentase Advice Planning yang Dikeluarkan Sesuai Tata Ruang	%	100,00	94,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Persentase rata rata capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%									100	100
5	Rasio Rumah Layak Huni	%	78,34	78,76	80,17	79,17	82,03	79,39	83,94	79,80		
6	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	76,81	78,76	77,07	79,17	77,33	79,39	77,58	79,80		
7	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	53,77	53,60	55,70	55,70	57,72	0,57	59,83	59,54		
8	Persentase peningkatan RTLH yang diperbaiki	%									75,48	70,71
9	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	81,48	100,00	88,89	100,00	92,59	100,00	96,30	100,00		
10	Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%									40	40,92
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Ases Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	73,37	75,45	74,46	76,54	75,58	76,99	77,08	77,57		
12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab Kota	%									78,58	79,51

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	S A T	2020		2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
13	Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	66,66	88,45	88,00	88,83	90,00	90,00	92,00	92,00		
14	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%									94	93,24
15	Persentase Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik	%	11,48	11,38	11,53	11,69	11,58	11,66	11,63	11,82		
16	Persentase Peningkatan Drainase lingkungan dalam Kondisi Baik	%									0,92	1,54
17	Rasio Permukiman Layak Huni	%	79,82	79,81	79,90	79,89	79,99	79,97	80,06	80,10		
18	Rasio Permukiman Layak Huni	%									80,21	80,15
19	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan	%	8,16	7,80	8,05	7,15	7,94	6,54	7,83	5,48		
20	Persentase Penanganan Permukiman Kumuh	%	6,09	0,44	7,31	6,12	8,53	5,75	9,74	12,18		
21	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	1,34	1,26	0,89	0,61	0,44	0,44	-	-		
22	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	20,23	20,19	20,22	20,11	20,21	20,03	20,19	19,89		
23	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani	%									43,15	55,41
24	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	%	39,42	35,33	41,73	34,30	43,98	33,28	46,18	32,26		
25	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%									100	100
26	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%									100	100
27	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	%									N/A	N/A

: Indikator Kinerja Utama pada RPD 2024-2026

2.2. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas tanah serta mendukung penataan kawasan permukiman yang tertib dan berkelanjutan. Fokus utama urusan ini meliputi pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPPT) dan sertifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

Pelayanan IPPPT bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, serta berfungsi sebagai instrumen pengendalian alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan perumahan dan permukiman. Melalui proses perizinan ini, setiap perubahan penggunaan tanah diharapkan dapat dilaksanakan secara legal dan selaras dengan kebijakan tata ruang yang berlaku.

Sementara itu, sertifikasi PSU perumahan dilaksanakan untuk menjamin legalitas aset PSU yang telah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah. Sertifikasi ini menjadi dasar bagi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas umum di lingkungan perumahan, seperti jalan, taman, dan saluran air, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan secara optimal dan menjamin keberlanjutan infrastruktur permukiman.

2.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINPERKIM Kab. Banyumas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan perumahan layak huni serta penataan kawasan permukiman berkelanjutan. Selain itu, DINPERKIM berperan dalam menjamin akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Amanat atas peran tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.

2.3.1. Tugas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.3.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. pelaksanaan kesekretariatan dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.3.3. Struktur Organisasi DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Bidang Perumahan dan Pertanahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinperkim Kab. Banyumas
Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 89 Tahun 2025.

2.3.4. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
 - 1) Merumuskan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan program yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan sasaran strategis sebagai upaya pengendalian pelaksanaan tugas;
 - 3) Mengendalikan pelaksanaan seluruh program di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pengawasan secara berkala agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana;
 - 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - 5) Membina sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui fasilitasi pengembangan pegawai

sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;

- 6) Merumuskan kebijakan teknis pada bidang kesekretariatan, perumahan dan pertanahan, dan kawasan permukiman, sesuai kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 7) Menyelia pelaksanaan kebijakan pada bidang kesekretariatan, perumahan dan pertanahan, dan kawasan permukiman sesuai kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan pada bidang kesekretariatan, perumahan dan pertanahan, dan Kawasan permukiman sesuai kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 9) Mengesahkan dan mengarahkan penyelenggaraan administrasi pada bidang kesekretariatan, perumahan dan pertanahan, dan kawasan permukiman sesuai kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan membandingkan antara rencana kerja dan realisasi pelaksanaan sebagai bahan penyusunan laporan serta perencanaan program selanjutnya;
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan program yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris

- 1) Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta arahan pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan guna menjamin pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang

berlaku guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- 5) Merumuskan, mengoordinasikan, dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 7) Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan rencana operasional dan realisasi pelaksanaan sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja secara berkala sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Kasubbag. Keuangan

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan guna memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku guna mencegah terjadinya kesalahan;

- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang terkait dengan:
 - a) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), pergeseran anggaran, Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - b) pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - c) pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - d) fasilitasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak;
 - e) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang keuangan; dan
 - f) kegiatan lain yang terkait dengan kewenangannya.
 - 6) Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan;
 - 7) Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan membandingkan rencana operasional dan realisasi pelaksanaan sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya;
 - 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan secara berkala sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja serta bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; dan
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan guna memperlancar pelaksanaan tugas;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku guna mencegah terjadinya kesalahan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang terkait dengan:
 - a) kerumahtanggaan dan perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan, penggunaan, dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana, dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas;
 - b) pengelolaan kepegawaian yang meliputi:
 - 1) penyusunan analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, dan evaluasi jabatan;
 - 2) penyusunan formasi pegawai;
 - 3) pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian, meliputi cuti, mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, dan administrasi kepegawaian lainnya; dan
 - 4) ketatausahaan kepegawaian yang meliputi pengelolaan daftar hadir, administrasi kepegawaian, penegakan disiplin pegawai, pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penilaian prestasi kerja, dan administrasi terkait lainnya;
 - c) organisasi dan tata laksana yang meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, fasilitasi penataan kelembagaan, pengusulan atau pemrosesan pendelegasian kewenangan, serta penghimpunan bahan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi;
 - d) pelayanan administrasi persuratan yang meliputi penerapan tata naskah dinas, pengelolaan persuratan, dan administrasi sejenis lainnya; dan
 - e) penyelenggaraan urusan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan, dan perpustakaan;
- 6) melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tercapainya kualitas kegiatan yang ditetapkan;

- 7) memverifikasi administrasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan membandingkan antara rencana operasional dan pelaksanaan tugas sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja serta bahan perencanaan kegiatan selanjutnya; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Perumahan dan Pertanahan berdasarkan program kerja DINPERKIM serta arahan pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku guna mencegah terjadinya kesalahan pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Perumahan dan Pertanahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- 5) merumuskan, mengoordinasikan, dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis serta program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan;
- 6) memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan;
- 7) melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah;

- 8) memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan antara rencana operasional dan realisasi pelaksanaan tugas sebagai bahan penyusunan laporan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Perumahan dan Pertanahan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja DINPERKIM serta arahan pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 3) memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- 5) merumuskan, mengoordinasikan, dan membimbing pelaksanaan kebijakan teknis serta program kerja Bidang Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, yang meliputi:
 - a) pengelolaan permukiman; dan
 - b) peningkatan kualitas permukiman;
- 6) memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

menjamin kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan;

- 7) melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah;
- 8) memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman serta pelaksanaan tugas bawahan dengan membandingkan antara rencana operasional dan realisasi pelaksanaan tugas sebagai bahan penyusunan laporan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dan/atau administratif sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing, dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Sumber Daya DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya tersebut merupakan modal utama dalam mendukung penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pertanahan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Saat ini, DINPERKIM Kabupaten Banyumas didukung oleh 73 (tujuh puluh tiga) orang pegawai, yang terdiri atas 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 16 (enam belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 25 (dua puluh lima) orang tenaga non ASN.

Pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Dua (S2). Keberagaman ini menjadi modal penting dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi maupun teknis yang menjadi kewenangan dinas, sekaligus mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja masing-masing. Pengaturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja individu dan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian target output dan outcome program serta kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan tingkat pendidikan selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3:

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN	
1.	SD	1	-	2	3
2.	SMP/Sederajat	-	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	7	2	10	19
4.	D3	3	1	2	6
5.	D4	-	-	1	1
6.	S1	17	13	10	40
7.	S2	4	-	-	4
Jumlah		32	16	25	73

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian DINPERKIM Kab. Banyumas

Dilihat dari golongan kepangkatannya, pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas didominasi

oleh golongan III pada PNS atau golongan IX pada PPPK, yaitu sebanyak 41 orang dari total pegawai pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang jabatan fungsional maupun struktural yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) atau setara, serta didukung oleh pengalaman kerja yang memadai.

Komposisi tersebut mencerminkan potensi SDM yang cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan teknis, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam mendukung tertib administrasi pertanahan.

Rincian lengkap jumlah ASN berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai DINPERKIM Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I (PNS) / I (PPPK)	3
2.	Golongan II (PNS) / V, VII (PPPK)	22
3.	Golongan III (PNS) / IX (PPPK)	41
4.	Golongan IV	4

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian Dinperkim Kab. Banyumas

2.4.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Dilihat dari aspek sarana dan prasarana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas telah didukung oleh fasilitas yang relatif memadai, baik berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Sarana dan prasarana yang dimiliki DINPERKIM Kabupaten Banyumas meliputi bangunan gedung serta peralatan dan mesin, dengan rincian sebagaimana diuraikan berikut:

Tabel 2.5 Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025

BUKU INDUK KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN													Intrakomptabel			
PROVINSI		: JAWA TENGAH														
KABUPATEN		: BANYUMAS														
SKPD		: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman														
PENANGGUNG JAWAB		:														
LOKASI PENANGGUNG JAWAB		: Jln. Gerilya Barat No 5														
													KODE LOKASI	11100501000000000000		
No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																
1.	132010305010	5	Pompa Air	2022	Mitsubishi	2"	Besi-seng, radiator						APBD Kab.	3.500.000		
2.	132020101003	1	Station Wagon	2007	Toyota	1498 cc	Besi		MHFM1CA4J7K004958	DAE1507	R 1197 XA	E-6209067	APBD Kab.	100.000.000	Ex R 38 A- R 9500 EG	
3.	132020101003	1	Station Wagon	2012	Toyota	1298 cc	Besi		MHKM1BA3JCK086729	DL67568	R 1765 XA	J-04392463	APBD Kab.	165.872.892	Mutasi dari DPPKAD (Eks R 9504 SS)	
4.	132020101003	2	Station Wagon	2012	Toyota	1298 cc	Besi		MHKM1BA3JCK086703	DL67722	R 1764 XA	J-04392454	APBD Kab.	165.872.892	Dari BKD (Eks R 9503 SS)	
5.	132020101003	1	Station Wagon	2017	Toyota	1329 cc	Besi		MHKM5EA3JHK058379	1NRF251633	R 1292 XA	N-02083260	APBD Kab.	193.435.532		
6.	132020101003	1	Station Wagon	2018	Toyota	1329 cc	Besi		MHKM5EA3JJK104876	1NRF403876	R 1453 XA	O-00752186	APBD Kab.	197.130.500	EX R 9505 JG	
7.	132020101003	1	Station Wagon	2023	Toyota	2000 cc	Besi Plastik		MHFAAAA3P0018148	M20A-NA97678	R 1667 XA	U-01799774	APBD Kab.	429.000.000	Asmin	
8.	132020103002	1	Pick Up	2006	Toyota	1781 cc	Besi		MHF31KF6060050024	7K 0847693	R 8121 XA	E-20492131	APBD Kab.	90.000.000	Ex- R 9581 AH	
9.	132020103002	1	Pick Up	2023	Toyota	2393	Besi Campuran		MR0DB8CD6P0128294	2GD-1345071	R 8250 XA	T-01846494	APBD Kab.	459.000.000		
10.	132020104001	1	Sepeda Motor	2002	Honda	100 cc	Besi		MH1NFG132K131214	NFGEE-1131533	R 6020 XH	C-1685797	Hibah	4.500.000	ex.R 9798 CH	
11.	132020104001	2	Sepeda Motor	2002	Honda	100 cc	Besi		MH1HA8B182K036702	HABBE 1036805	R 6157 XH	C-2216220	APBD Kab.	7.500.000	Ex- R 9651 DH	
12.	132020104001	3	Sepeda Motor	2002	Honda	100 cc	Besi		MH1HABB182K037431	HABBE 1037393	R 6687 XH	C-2216216	APBD Kab.	5.000.000	Exs.R 9785 DH	
13.	132020104001	1	Sepeda Motor	2012	Honda	160 cc	Besi		MH1KC311XCK264063	KC31E - 1263674	R 6826 XH	J-04627701	APBD Kab.	19.307.655	Ex- R 9907 FH-Mutasi dari DPPKAD	
14.	132020104001	1	Sepeda Motor	2014	Yamaha	150 cc	Besi		MH31PA004EK705300	1PA-722498	R 6761 XA	L-07336140	APBD Kab.	23.100.000	Ex- R 9654 HH-Mutasi dari DPPKAD	
15.	132020104001	2	Sepeda Motor	2014	Kawasaki	150 cc	Besi		MH4LX150CEJP17157	LX150CEPJ2751	R 6248 XS	L-09206137	APBD Kab.	25.850.000	Mutasi dari DPPKAD	
16.	132020104001	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha	150 cc	Besi		MH3RG1810FK065271	G3E7E-0065355	R 6294 XA	M-05490566	APBD Kab.	24.674.293	Ex-R 9731 JH	
17.	132020104001	2	Sepeda Motor	2015	Yamaha	150 cc	Besi		MH3RG1810FK127043	G3E7E-0124775	R 6296 XA	M-05490554	APBD Kab.	24.674.293	Ex-R 9732 JH	
18.	132020104001	3	Sepeda Motor	2015	Yamaha	150 cc	Besi		MH3RG1810FK074631	G3E7E-0075061	R 6295 XA	M-05490525	APBD Kab.	24.674.293	Ex-R 9694 JH-Dari Kecamatan Lumbir	
19.	132020104001	4	Sepeda Motor	2015	Yamaha	150 cc	Besi		MH3RG1810FK115842	G3E7E-0117220	R 6293 XA	M-05490527	APBD Kab.	24.674.293	R 9695 JH-Dari Kecamatan Purwojati	
20.	132020104001	1	Sepeda Motor	2016	Yamaha	113 cc	Besi		MH3UE1110GJ004859	E3R5E - 0116628	R 6765 XA	N-00299978	APBD Kab.	15.673.256	Ex-R 9900 JH-Dari DPPKAD	
SimbadaMas																
														Hal 1 dari 18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.	132020104001	3	Sepeda Motor	2016	Yamaha	113 cc	Besi		MH3UE1110GJ004864	E3R5E - 0116671	R 6768 XA	N-00299980	APBD Kab.	15.673.256	Ex-R 9902 JH-Dari DPPKAD
22.	132020104001	4	Sepeda Motor	2016	Kawasaki	150 cc	Besi		MH4LX150GGJP25977	LX150CEPW5645	R 6601 XA	M-14335823	APBD Kab.	28.500.000	Ex-R 9814 JH-Dari BKAD
23.	132020104001	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha	113 cc	Besi		MH3UE1120HJ146151	E3R5E-0154582	R 6689 XH	N-09711555	APBD Kab.	16.013.627	Ex-R 9697 KH-Dari BKAD
24.	132020104001	2	Sepeda Motor	2017	Yamaha	113 cc	Besi		MH3UE1120HJ118652	E3R5E-0124858	R 6690 XH	N-09711556	APBD Kab.	16.013.627	Ex-R 9698 KH-Dari BKAD
25.	132020104001	3	Sepeda Motor	2017	Yamaha	113 cc	Besi		MH3UE1120HJ138830	E3R5E-0146857	R 6691 XH	N-09711557	APBD Kab.	16.013.627	Ex-R 9699 KH-Dari BKAD
26.	132020104001	4	Sepeda Motor	2017	Yamaha	125 cc	Besi		MH3SE8890HJ187395	E3R2E-1377478	R 6218 XH	N-08058883	APBD Kab.	16.013.627	Eks R 9643 KH, diusuln Mutasi ke DINPERKIM
27.	132020104001	1	Sepeda Motor	2018	Yamaha	125 cc	Besi		MH3SEE410JJ085963	E3R2E2172157	R 6358 XH	P-01631199	APBD Kab.	16.400.000	Eks R 9929 KH, diusuln mutasi ke DINPERKIM
28.	132020104001	1	Sepeda Motor	2023	Yamaha	155 CC	Besi Plastik		MH3SG5620PJ863204	G3L8E1847500	R 6775 XR	U-02679146	APBD Kab.	31.800.000	
29.	132020104001	2	Sepeda Motor Trail	2023	Kawasaki Trail	150 CC	Besi Plastik		MH4LX150LPJP03927	LX150KEP17488	R 6726 XR	U-02279633	APBD Kab.	33.800.000	
30.	132020106005	1	Mobil Tinja	2018	Isuzu	4570 cc	Besi		MHCNMR71HJJ092926	B092926	R 8571 XA	O-08194350	APBD Kab.	449.953.938	Eks R 9567 BH
31.	132020106005	1	Mobil Tinja	2023	HTM	200 CC	Rangkaian Besi,Tangki	-	MGC1220TMPJ060270	AP164FMLM8507 917	R 6828 XR	U-02680193	APBD Kab.	73.250.000	Warna MERAH
32.	132020106005	2	Mobil Tinja	2023	HTM	200 CC	Rangkaian Besi,Tangki	-	MGC1220TMPJ060271	AP164FML P8565573	R 6827 XR	U-02680192	APBD Kab.	73.250.000	Warna MERAH
33.	132020106005	3	Mobil Tinja	2023	HINO	4009 CC	Rangkaian Besi,Vacum,Tangki		MJECCB2F3P5013179	N04CWYJ23230	R 8566 XA	U-01799671	APBD Kab.	598.000.000	POMPA 2X-15
34.	132020106006	1	Mobil Tangki	2015	Toyota	4009 cc	Besi		MHFC1JU43F5129745	WC4DT-RR24777	R 8023 XA	M-02446034	APBD Kab.	389.557.987	Ex- R 9544 BH
35.	132020106110	1	Mobil Toilet	2018	Isuzu	4570 cc	Besi		MHCNMR71HJJ092925	B092925	R 8572 XA	O-08194351	APBD Kab.	643.912.687	Eks R 9568 BH
36.	132030207009	1	Mesin Grenda	2019	Tanpa Merk		Besi,Pisau						APBD Kab.	700.000	
37.	132030301072	1	Global Positioning System	2018	Garmin		Plastik						APBD Kab.	8.100.000	
38.	132030309018	1	Laser Meter	2013	TANPA MERK	100 M	ABS Plastik						APBD Kab.	8.000.000	
39.	132030309018	1	Teodolite	2014	Besi		Besi						APBD Kab.	77.627.000	
40.	132030309018	1	GPS	2016	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	4.125.000	
41.	132030309018	2	GPS	2016	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	4.125.000	RUSAK
42.	132030309018	1	Test Hammer	2017	Matest Italy		Besi,Memory						APBD Kab.	15.500.000	
43.	132030321001	1	Meteran Roll Roda	2021	Aldo	Analog	ABS Plastik,roda meteran						APBD Kab.	720.000	CV SAPUTRA MAKMUR
44.	132030321001	1-9	Meteran Roll Roda	2022	Worker Safety	Meter	Aluminium (Teleskopik)						APBD Kab.	8.181.800	CV. ASTA JAYA
45.	132030321001	10	Meteran Roll Roda	2022	Work Safety	Meter	Aluminium, Teleskopik						APBD Kab.	900.000	
SimbadaMas															
															Hal 2 dari 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46.	132040102007	1	Alat Semprot Punggung Manual dan Listrik	2023	SWAN	14 Liter	Kuningan-Seng						APBD Kab.	550.000	
47.	132050102010	1-2	Mesin Absen	2016	Magic		ABS Plastik,Memory						APBD Kab.	9.400.000	
48.	132050102010	1	Mesin Absen Elektronik	2018	Primattech		ABS Plastik,Memory						APBD Kab.	4.350.000	
49.	132050104001	1-4	Rak Besi	1995	TANPA MERK	4 Susun	Besi Plat						APBD Kab.	1.000.000	
50.	132050104001	1	Lemari Aluminium,Kaca	2011	Tanpa Merk	2 pintu	Aluminium,Kaca						APBD Kab.	3.550.000	Pintu Geser
51.	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	2013	TANPA MERK	4 laci	Besi metal						APBD Kab.	1.940.000	
52.	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	2014	Brother	2 laci	Besi/metal						APBD Kab.	2.750.000	
53.	132050104001	2	Lemari Besi/Metal	2014	Brother	2 laci	Besi,Kaca						APBD Kab.	2.750.000	
54.	132050104001	1	Lemari Besi	2016	Brother	4 laci	Aluminium-kaca						APBD Kab.	2.530.000	
55.	132050104001	2	Lemari Besi	2016	Brother	4 laci	Aluminium-kaca						APBD Kab.	2.530.000	
56.	132050104002	1	Lemari Kayu	2006	TANPA MERK	4 laci	Kayu						APBD Kab.	680.000	Exs. DLH
57.	132050104002	2	Lemari Es	2006	Sharp	Pintu 1	ABS Plastik,Aluminium, Freon						APBD Kab.	250.000	EXS.DLH
58.	132050104002	3	Lemari Kayu Kecil	2006	TANPA MERK		Kayu,Kaca						APBD Kab.	150.000	Exs. DLH
59.	132050104002	4	Lemari Kayu	2006	Tanpa Merk		Kayu,Kaca						APBD Kab.	400.000	EXS.DLH
60.	132050104002	5	Lemari Kayu	2006	TANPA MERK		Kayu						APBD Kab.	350.000	Exs. DLH
61.	132050104002	1-4	Almari	2008	TANPA MERK		Kayu						APBD Kab.	18.450.000	DCKKTR
62.	132050104002	5	Pengadaan Almari 1 buah	2010	TANPA MERK		Kayu,Kaca						APBD Kab.	3.500.000	
63.	132050104002	1	Lemari	2013	TANPA MERK		Kaca						APBD Kab.	1.940.000	
64.	132050104002	2	Rak Dinding	2013	TANPA MERK		Kayu-kaca						APBD Kab.	15.000.000	2 Buah
65.	132050104003	1	Rak besi	1995	TANPA MERK	4 Susun	Besi plat						APBD Kab.	30.000	
66.	132050104003	2-3	Rak Besi	1995	TANPA MERK	4 Susun	Besi Plat						APBD Kab.	100.000	Exs. DLH
67.	132050104003	1-3	Rak Besi	2015	TANPA MERK	4 Susun	Besi Plat						APBD Kab.	4.650.000	
68.	132050104003	4-5	Rak Besi	2015	TANPA MERK	4 Susun	Besi plat siku						APBD Kab.	3.100.000	
69.	132050104007	1	Brand Kas	2006	Okida	1000 range	Besi						APBD Kab.	6.750.000	Sub Keuangan
70.	132050104007	2	Brand Kas	2006	Heroules		Besi						APBD Kab.	450.000	Exs. DLH
71.	132050104009	1	Kardex Besi	1998	TANPA MERK		Besi						APBD Kab.	40.000	
72.	132050104010	1	Kardex Kayu	2002			Kayu						APBD Kab.	400.000	
73.	132050104026	1	Filing kabinet	2006	elite	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	2.250.000	Exs. DLH
74.	132050104026	2	Filing Kabinet	2006	Dolphin	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	2.250.000	RUSAK
75.	132050104026	3-5	Filing Kabinet	2006	Brother	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	1.350.000	Exs. DLH
76.	132050104026	1	Filing Besi/Metal	2007	Dolpin	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	900.000	Exs. DLH
77.	132050104026	2-4	Filing Besi/Metal	2007	Brother	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	2.700.000	Exs. DLH
78.	132050104026	5	Filing Kabinet	2007	Dolphin	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	1.125.000	RUSAK
79.	132050104026	6-7	Filing Kabinet	2007	Brother	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	2.250.000	Exs. DLH
Simbadamas														Hal 3 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80.	132050104026	8-9	Filing Cabinet	2007	Elite	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	2.250.000	Exs. DLH
81.	132050104026	10	Filing Kabinet	2007	Daito	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	4.446.750	Exs. DLH
82.	132050104026	1-4	Filing Besi/Metal	2010	Lion	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	14.600.000	Warna Biru
83.	132050104026	5	Filing Cabinet	2010	Lion	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	7.500.000	
84.	132050104026	1	Filing Cabinet	2011	Dolphin	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	3.880.000	
85.	132050104026	1-3	Filing Besi/Metal	2012	Dolphin	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	13.200.000	
86.	132050104026	4	Filing Besi/Metal	2012	Daito	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	3.300.000	
87.	132050104026	1	Lemari Besi Metal	2014	Frontline	4 laci	Besi Metal,Kaca						APBD Kab.	3.250.000	
88.	132050104026	2	Filing Kabinet	2014	Lion	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	2.750.000	Type L44
89.	132050104026	1-2	Filing Kabinet	2015	DOLPHIN	4 laci	Besi-seng						APBD Kab.	5.500.000	
90.	132050104026	1-2	Filing Besi/Metal	2019	Dolphin	4 laci	Besi,Seng						APBD Kab.	8.000.000	
91.	132050104026	3	Filing Besi/Metal	2019	Tiger	4 laci	Besi-Seng						APBD Kab.	3.750.000	
92.	132050104027	1	Lemari Kaca	2006	TANPA MERK		Kaca - kayu						APBD Kab.	500.000	
93.	132050104027	1	Lemari Kaca	2024	BROTHER	180x90cm	Besi dan kaca	-	-	-	-	-	APBD Kab.	3.845.000	
94.	132050104029	4	Lemari	2009	TANPA MERK		Kayu/Kaca						APBD Kab.	1.500.000	
95.	132050105003	1	Papan Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2018		120x180cm	Triplek/melamin						APBD Kab.	29.625.000	Penataan Ruang
96.	132050105003	2	Papan Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2018		120x180	Triplek/melamin						APBD Kab.	29.625.000	Penataan Ruang
97.	132050105003	3	Papan Informasi Kegiatan HALS	2018		120x180cm	Triplek/melamin						APBD Kab.	34.900.000	14 buah
98.	132050105003	1	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.091 m2
99.	132050105003	2	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.559 m2
100.	132050105003	3	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.183 m2
101.	132050105003	4	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.714 m2
102.	132050105003	5	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.264 m2
103.	132050105003	6	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 3.324 m2
104.	132050105003	7	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 3.649 m2
105.	132050105003	8	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 3.051 m2
106.	132050105003	9	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.115 m2
107.	132050105003	10	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 3.317 m2
108.	132050105003	11	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.512 m2
109.	132050105003	12	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 2.136 m2
SimbadaMas														Hal 4 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
110.	132050105003	13	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 2.556 m2
111.	132050105003	14	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 759 m2
112.	132050105003	15	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.357 m2
113.	132050105003	16	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 4.350 m2
114.	132050105003	17	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 3.905 m2
115.	132050105003	18	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 471 m2
116.	132050105003	19	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 1.223 m2
117.	132050105003	20	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 2.227 m2
118.	132050105003	21	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 15.240 m2
119.	132050105003	22	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 8.273 m2
120.	132050105003	23	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 3.597 m2
121.	132050105003	24	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 827 m2
122.	132050105003	25	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 2.615 m2
123.	132050105003	26	Papan Nama Identitas Kepemilikan Tanah PSU	2024	Tanpa Merk	100x60x240 cm	Rangka papan besi hollo.pelat	-	-	-	-	-	APBD Kab.	1.600.000	Luas Perumahan 2.088 m2
124.	132050105005	1	White Board	2009	TANPA MERK	80x120cm	Triplek/melamin						APBD Kab.	2.500.000	RUSAK
125.	132050105005	2	White Board	2009	TANPA MERK	Buah	Triplek,Melamin						APBD Kab.	2.325.000	RUSAK
126.	132050105005	1	White Board	2012	TANPA MERK	90x120 cm	Triplek/melamin						APBD Kab.	590.000	DCKKTR
127.	132050105008	1	Peta Kabupaten Banyumas	1995	TANPA MERK	80x120cm	Kertas/Kayu Bingkai						APBD Kab.	12.500	DCKKTR
128.	132050105023	1	Layar Proyektor	2013	TANPA MERK	120x220cm	Tripod Screen proyektor						APBD Kab.	6.000.000	DCKKTR
129.	132050105034	1	Theodolit	2006	THEODOLIT		Besi						APBD Kab.	3.000.000	Exs. DLH
130.	132050105043	1	LCD Projector/Infocus	2021	Epson	HDMI	ABS Plastik,Lensa Kamera	V111H98605 2		T8886482301116			APBD Kab.	11.300.000	Model H986C (EB-972 ESP)
131.	132050105043	1	LCD Projector/Infocus	2022	Epson	HDMI	ABS Plastik,Lensa Kamera						APBD Kab.	9.900.000	CV. ASTA JAYA
132.	132050105053	1	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2021	TANPA MERK	2x2m	Kain katun						APBD Kab.	1.500.000	
133.	132050105088	1	Meja Pingpong	2013	Power Spin	270x152x76 cm	Papan,net,bed						APBD Kab.	3.950.000	
134.	132050105088	2	Soud sytem	2013			Kayu & plastik						APBD Kab.	9.733.000	DCKKTR
135.	132050105088	1	Sekat Kaca di MPP	2019			Kaca,acrilic						APBD Kab.	1.800.000	DIGITATA INTERIOR DESIGN
Simbadamas															Hal 5 dari 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
136.	132050105088	1	Meja Tenis Meja	2020	Power Spin	274x152x78 cm	MDF dengan Kaki Besi						APBD Kab.	8.535.000	DINPERKIM
137.	132050201002	1	Meja Tulis	1991	Tanpa Merk	120x60 cm	Kayu						APBD Kab.	400.000	RUSAK
138.	132050201002	2	Meja Tulis	1991	Tanpa Merk	120x60 cm	Kayu						APBD Kab.	400.000	RUSAK
139.	132050201002	1	Meja Tulis	1993	TANPA MERK	120x60 cm	Kayu						APBD Kab.	5.200.000	Exs. DLH
140.	132050201002	2	Meja Tulis	1993	Tanpa Merk	120x60 cm	Kayu						APBD Kab.	300.000	-
141.	132050201002	1	Meja Ukir Kecil	2005	TANPA MERK	60x40 cm	Kayu						APBD Kab.	300.000	Ex-DLH
142.	132050201002	1-7	Meja Tulis	2008	TANPA MERK	120x60 cm	Kayu						APBD Kab.	1.185.500	Exs. DLH
143.	132050201002	8	Meja Kerja	2008	Tanpa merk	120x65x75 cm	Kayu						APBD Kab.	28.500	Exs. DLH
144.	132050201002	9-14	Meja Tulis	2008	Tanpa merk	120x65x75 cm	Kayu						APBD Kab.	1.179.500	Exs. DLH
145.	132050201002	10	Meja Tulis	2008	Tanpa merk	120x65x75 cm	Kayu						APBD Kab.	20.000	EXS.DLH
146.	132050201002	1	Meja Kerja Kayu	2021	Tanpa Merk	120x60cmx75 cm	Kayu,papan						APBD Kab.	3.500.000	K UPT
147.	132050201005	1	Meja Kursi Tamu	2011	Tanpa merk		Kayu,kain						APBD Kab.	1.800.000	
148.	132050201008	1	Meja Rapat	2009	TANPA MERK	180x80 cm	Kayu,papan,triplek						APBD Kab.	23.735.000	10 buah
149.	132050201008	1-6	Meja Rapat	2021	TANPA MERK	240x80x80cm	Kayu,papan						APBD Kab.	19.200.000	
150.	132050201008	1	Meja Rapat	2021	Tanpa Merk								APBD Kab.	1.000.000	Dokumen SPJ Pemeliharaan
151.	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	2020	Tanpa Merk	120x65x75 cm	Kayu						APBD Kab.	2.500.000	1
152.	132050201024	2	Meja 1/2 Biro	2020	Tanpa Merk	120x65x75 cm	Kayu						APBD Kab.	2.500.000	2
153.	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	2021		120x60cm	Buah						APBD Kab.	1.700.000	Staff UPT
154.	132050201030	1-55	Kursi Rapat	2009	Elephan	45x35 cm	Besi,kain, spon						APBD Kab.	12.960.000	
155.	132050201030	12-45	Kursi Rapat	2009	Elephan	45x35 cm	Besi,kain, spon						APBD Kab.	6.480.000	
156.	132050201030	36	Kursi Rapat	2009	Elephan	45x35 cm	Besi,kain, spon						APBD Kab.	360.000	
157.	132050201030	1-8	Kursi Rapat	2021	Chitose	420x505x868 mm	Stainless Steel,Kain,Spon						APBD Kab.	3.850.000	Warna Coklat
158.	132050201030	4	Kursi Rapat	2021	Chitose	420x505x868 mm	Stainless Steel,Kain,Spon						APBD Kab.	550.000	Warna Coklat
159.	132050201030	1-20	Kursi Rapat	2024	FUTURA	40X40X80 CM	Stainless dan Busa kain						APBD Kab.	11.000.000	WARNA MERAH TUA
160.	132050201031	1	Kursi Tamu	2011	ERGOTECH		Stainless Steel						APBD Kab.	3.750.000	
161.	132050201031	1	Kursi Tamu	2014	Louise Kerang		Kayu jati						APBD Kab.	3.275.000	
162.	132050201032	1-4	Kursi Putar	2020	Boss Man		Busa dan Stainless Steel						APBD Kab.	5.000.000	WARNA COKLAT
163.	132050201032	2	Kursi Putar	2020	Boss Man		Busa dan Stainless Steel						APBD Kab.	2.500.000	Hitam
164.	132050201032	3	Kursi Putar	2020	Boss Man		Busa dan Stainless Steel						APBD Kab.	2.500.000	WARNA HITAM
Simbadamas															
Hal 6 dari 18															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
165.	132050201032	1-6	Kursi Putar	2021	BOSS MAN	65x50x120cm	Busa dan Stainless Steel						APBD Kab.	17.450.000	Warna Coklat - Hitam
166.	132050201032	4	Kursi Putar	2021	BOSS MAN	65x50x120cm	Busa dan Stainless Steel						APBD Kab.	3.490.000	Warna Coklat - Hitam
167.	132050201032	1-2	Kursi Putar	2024	ACERO	65x65x110 CM	Stainless,roda kursi putar						APBD Kab.	6.984.000	Warna Hitam
168.	132050201033	12	Kursi Kerja Model Putar	2013	JUNIOR		Besi,kain, spon						APBD Kab.	799.000	Warna Hitam
169.	132050201033	13	Kursi Kerja Model Putar	2013	CHAIRMAN		Besi,kain, spon						APBD Kab.	799.000	Warna Abu-Abu
170.	132050201033	14	Kursi Kerja Model Putar	2013	CHAIRMAN		Besi,kain, spon						APBD Kab.	799.000	Warna Abu-Abu
171.	132050201035	1-2	Kursi Putar Sandaran Tangan	2014	Chairman		Besi,kain, spon						APBD Kab.	3.000.000	Warna Abu-Abu
172.	132050201035	3-5	Kursi Tunggu	2014	Chairman		Besi,kain, spon						APBD Kab.	4.500.000	Warna Abu-Abu
173.	132050201035	6-7	Kursi Tunggu	2014	CHAIRMAN		Besi stainless						APBD Kab.	7.000.000	
174.	132050201035	1	Bangku Tunggu Tamu	2024	Tanpa Merk	50x50x75 CM	Stainless Steel						APBD Kab.	3.621.500	Warna SILVER
175.	132050201039	3-6	Meja Komputer	2008	Activ		Partikel						APBD Kab.	4.665.000	
176.	132050201039	1	Pengadaan Meja Komputer 1 bh	2010	Activ		Harbort						APBD Kab.	2.700.000	
177.	132050201039	1	Meja Komputer	2012	Activ		Partikel						APBD Kab.	4.700.000	
178.	132050201039	2	Meja Komputer	2012	Active	P.46 x L.67 x T.1,7 x 1 cm	Partikel						APBD Kab.	880.000	
179.	132050201050	1	Meubelair	2012	Seraton		Kayu Jati						APBD Kab.	3.795.000	Meja Kursi
180.	132050201050	2	Meubelair	2012	Seraton		Kayu Jati						APBD Kab.	3.795.000	Meja kursi
181.	132050201050	3	Meubelair	2012	Seraton		Kayu Jati						APBD Kab.	3.960.000	Model Angsa
182.	132050201050	4	Lemari Kaca	2012	TANPA MERK	3 Laci	Aluminium, Kaca						APBD Kab.	2.500.000	
183.	132050201050	5	Almari Arsip	2012	TANPA MERK	4 Laci	Kayu						APBD Kab.	3.750.000	
184.	132050201050	6-7	Almari Pintu Sorong	2012	BROTHER	2 Laci	Besi-seng						APBD Kab.	3.900.000	
185.	132050201050	8	Lemari Arsip	2012	Tanpa Merk	4 Laci	Partikel,Kaca						APBD Kab.	2.000.000	
186.	132050201050	9-10	Lemari Kaca	2012	TANPA MERK	3 laci	Aluminium, Kaca						APBD Kab.	5.000.000	
187.	132050201050	11-12	Lemari Arsip	2012	Lion	4 laci	Besi,seng						APBD Kab.	4.900.000	tata ruang
188.	132050203001	1	Vacum Cleaner Besar	2013	Electrolux	Besar	ABS Plastik,Rangkaian elektron						APBD Kab.	1.693.000	
189.	132050203001	2	Vacum Cleaner Kecil	2013	Electrolux	Kecil	ABS Plastik,Rangkaian elektron						APBD Kab.	980.000	
190.	132050203003	1	Mesin Potong Rumput	2014	Stihl		Besi,seng						APBD Kab.	3.475.000	RUSAK
191.	132050203003	2	Mesin Potong Rumput	2014	Stihl		Besi,seng						APBD Kab.	3.475.000	
192.	132050204001	1	Lemari Es	2013	Sharp	Pintu 1	ABS Plastik,Aluminium, Freon						APBD Kab.	1.490.500	
193.	132050204001	1	Lemari Es	2014	LG	Pintu 1	ABS Plastik,Aluminium, Freon						APBD Kab.	2.450.000	
SimbadaMas															
														Hal 7 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
194.	132050204003	2	AC Unit	2007	LG	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	11.594.500	Exs. DLH
195.	132050204003	1	AC	2012	PANASONIC	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	4.070.000	
196.	132050204003	2-3	AC	2012	Daikin	1,5 Pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	9.000.000	
197.	132050204003	7	AC Unit	2013	LG	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	8.855.000	
198.	132050204003	1	AC Unit	2014	Panasonic	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	7.450.000	
199.	132050204003	1-4	AC Unit	2015	Panasonic	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	25.740.000	
200.	132050204003	1	AC Unit	2016	Sharp	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	6.913.000	
201.	132050204003	2	AC Unit	2016	Sharp	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	4.024.035	
202.	132050204003	1	AC Unit	2017	Panasonic	1,5 PK	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	8.033.333	
203.	132050204003	2	AC Unit	2017	Panasonic	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	8.033.333	
204.	132050204003	3-6	AC Unit	2017	Panasonic	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	24.100.001	
205.	132050204003	5	AC Unit	2017	Panasonic	1,5 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	8.033.333	
206.	132050204003	1	AC Unit	2018	SHARP	2 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	6.587.750	
207.	132050204003	1-2	AC Unit	2019	SHARP	2 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	14.080.000	
208.	132050204003	3-4	AC Unit	2019	SHARP	2 PK	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	14.080.000	
209.	132050204004	1	AC Split	2020	Sharp	2 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	7.442.625	
210.	132050204004	2	AC Split	2020	Sharp	2 pk	ABS Plastik, Aluminium, Freon						APBD Kab.	7.442.625	
SimbadMas															Hal 8 dari 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211.	132050204004	1-2	A.C. Split	2024	PANASONIC	2 PK	Besi, Plastik						APBD Kab.	19.600.000	
212.	132050204004	3	A.C. Split	2024	PANASONIC	1,5 PK	Besi, Plastik						APBD Kab.	8.000.000	
213.	132050204004	4-5	A.C. Split	2024	SHARP	2 PK	Besi,seng,Kompre sor dan Freon	-	-	-	-	-	APBD Kab.	19.940.000	
214.	132050204006	1-2	Kipas Angin	2015	Maspion		ABS Plastik						APBD Kab.	1.034.000	
215.	132050204012	1	Lemari kaca	2006	TANPA MERK	4 Laci	Kayu,kaca						APBD Kab.	500.000	
216.	132050205008	1	Tabung Gas	2009	Tanpa merk	12 kg	Besi						APBD Kab.	450.000	
217.	132050206002	2	Televisi	2012	Hitachi	32"	ABS Plastik,Polarizer,Ei ektro						APBD Kab.	4.950.000	
218.	132050206002	3	LCD Monitor	2012	LG	42 "	ABS Plastik,Polarizer,Ei ektro						APBD Kab.	6.250.000	
219.	132050206002	1	Televisi	2013	Sharp	32 "	ABS Plastik,Polarizer,Ei ektro						APBD Kab.	5.900.000	
220.	132050206002	2	Televisi	2014	Panasonic	32"	ABS Plastik,Polarizer,Ei ektro						APBD Kab.	3.415.000	
221.	132050206002	1-3	Televisi LED	2018	LG	32"	ABS Plastik,Polarizer,Ei ektro						APBD Kab.	8.789.625	
222.	132050206002	1-2	Televisi	2021	POLYTRON	65"	ABS Plastik,Polarizer,Ei ektro			SN:A0D121H0004 2			APBD Kab.	29.900.000	
223.	132050206002	1	Televisi	2022	POLYTRON	65"	ABS Plastik,Polarizer,Ei ektro						APBD Kab.	14.950.000	PT NAGA MAS JAYA
224.	132050206002	1	Televisi	2023	SAMSUNG	43 Inch	ABS Plastik Dynamic Crys Color						APBD Kab.	6.400.000	
225.	132050206008	1	Pengadaan Sound Sistem	2009	TANPA MERK		ABS Plastik, Elektronik, S peaker						APBD Kab.	7.220.000	
226.	132050206018	1	UPS	2020	ICA	600 VA	ABS Plastik, Elektronik						APBD Kab.	2.345.000	
227.	132050206018	1-2	UPS 650 VA	2022	APC	650 VA/ 360 Watt	ABS Plastik-Rangkaian elektro						APBD Kab.	4.000.000	
228.	132050206022	1-4	Camera Digital	2015	Sony	23 MP	Magnesium Allow, Camera						APBD Kab.	11.700.000	
229.	132050206022	1-2	Camera Digital	2018	Canon	20 MP	Magnesium Allow, Camera						APBD Kab.	5.040.000	
230.	132050206028	1	Lambang Garuda Pancasila	2013	Tanpa merk		Kayu						APBD Kab.	800.000	
231.	132050206036	1	Tangga Alumunium	2014		3 m	Alumunium						APBD Kab.	850.000	
232.	132050206039	1	Mimbar/Podium	2013	TANPA MERK		Kayu						APBD Kab.	1.800.000	
233.	132050206077	2	Speaker Aktif	2005	Simbada		ABS Plastik						APBD Kab.	100.000	Rusak
SimbadaMas														Hal 9 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
234.	132050206077	1	Pesawat Telephone	2006	Panasonic	Standard	ABS Plastik						APBD Kab.	164.000	Exs. DPU
235.	132050206077	1	Peralatan Kebersihan Tong Sampah	2009	TANPA MERK		ABS Plastik,Besi						APBD Kab.	5.263.000	
236.	132050206077	1	Rak Besi	2012	TANPA MERK	4 susun	Besi,plat siku						APBD Kab.	1.650.000	
237.	132050206077	2-14	Rak Besi	2012	TANPA MERK	4 susun	Besi,plat siku						APBD Kab.	18.150.000	
238.	132050206077	3	Rak Besi	2012	TANPA MERK	4 susun	Besi,plat siku						APBD Kab.	1.650.000	
239.	132050206077	5	Rak Besi	2012	TANPA MERK	4 susun	Besi plat siku						APBD Kab.	1.650.000	
240.	132050206077	1	GENSET	2013	Mextron	18,75 KVA	Besi,Radiator						APBD Kab.	63.525.000	
241.	132050206077	2	Antena Parabola	2014	Matrik	8 feet paragon	Aluminium,elektro nik						APBD Kab.	2.697.200	
242.	132050206077	0	Patok Untuk PSU Perumahan	2021		10x50cm	Beton						APBD Kab.	25.463.000	Pembuatan Patok Untuk PSU Perumahan untuk proses pembuatan SERTIFIKAT
243.	132050207001	1-4	Tabung Pemadam Kabakaran	2013	GUNNEBO	Standard	Besi,APAR						APBD Kab.	9.000.000	
244.	132050301005	1-3	Meja Biro Besar	2024	BIHIN MEBEL	180x90x75	Kayu papan						APBD Kab.	10.500.000	
245.	132050301006	1-3	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2012	Tanpa Merk	P.150 x L. 75 x T. 75	Kayu jati						APBD Kab.	4.180.000	
246.	132050301006	2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2012	Tanpa Merk	P.150 x L. 75 x T. 75	Kayu Jati						APBD Kab.	2.090.000	
247.	132050301009	1-6	Meja Kerja	1996	Tanpa Merk	120x60x75 cm	Kayu						APBD Kab.	791.200	Exs. DPU
248.	132050301009	1-9	Meja Kerja	2007	Tanpa Merk	120x60x75 cm	Kayu						APBD Kab.	7.200.000	Exs. DLH
249.	132050301009	6	Meja Kerja	2007	Tanpa Merk	120x60x75cm	Kayu						APBD Kab.	900.000	Exs. DLH
250.	132050301009	1	Meja Kerja Fungsional Umum	2012	Tanpa Merk	120x60x75 cm	Kayu						APBD Kab.	869.000	
251.	132050301009	2-13	Meja Kerja Fungsional Umum	2012	Tanpa Merk	120x60x75 cm	Kayu						APBD Kab.	9.559.000	
252.	132050301009	5	Meja Kerja Fungsional Umum	2012	Tanpa Merk	120x60x75 cm	Kayu						APBD Kab.	869.000	
253.	132050301009	14-22	Meja Kerja Fungsional Umum	2012	Tanpa merk	120x120x75 cm	Kayu						APBD Kab.	7.821.000	
254.	132050301009	23-30	Meja Kerja Fungsional Umum	2012	Tanpa merk	120x60x75 cm	Kayu						APBD Kab.	6.952.000	
255.	132050301009	1-10	Meja Rapat Lengkung	2017	Tanpa merk	180x65x75 cm	Kayu,papan,kaca						APBD Kab.	19.500.000	
256.	132050301009	1	Meja Kabinet di MPP	2019	Tanpa merk	180x60x75 cm	Kayu,kaca						APBD Kab.	1.750.000	DIGITATA INTERIOR DESIGN
257.	132050301009	2	Meja Printer di MPP	2019	Tanpa merk	80x60 cm	Kayu,kaca						APBD Kab.	500.000	DIGITATA DESIGN INTERIOR
258.	132050302010	1	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2019	Tanpa merk	Set	Kayu						APBD Kab.	5.000.000	BIHIN MEBEL
259.	132050302011	1	Meja Kursi Tamu	2006	Tanpa merk		Kayu,kaca						APBD Kab.	200.000	Exs. DLH
260.	132050302011	1	Meja Kursi Tamu	2009	Tanpa merk		Kayu Jati						APBD Kab.	3.745.000	
Simbadamas															Hal 10 dari 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
261.	132050303006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2012	Tanpa Merk	120x65x75 cm	Kayu						APBD Kab.	1.760.000	
262.	132050303006	2	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2012	Tanpa Merk	120 x65 x75 cm	Kayu						APBD Kab.	1.760.000	
263.	132050303006	3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2012	Tanpa Merk	130 x 65 x 75 cm	Kayu						APBD Kab.	1.760.000	
264.	132050303006	4	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2012	Tanpa Merk	120 x 65 x75 cm	Kayu						APBD Kab.	1.760.000	
265.	132050303006	5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2012	Tanpa Merk	120 x65 x 75 cm	Kayu						APBD Kab.	1.760.000	
266.	132050303008	1	Kursi Kerja	2009	CHITOSE	45x35 cm	Kayu						APBD Kab.	8.400.000	-
267.	132050303009	1	Kursi Kerja di MPP	2019			Kayu, triplek, busa						APBD Kab.	900.000	DIGITATA INTERIOR DESIGN
268.	132050306013	1	Meja Kursi Tamu	2013	Tanpa Merk		Kayu jati						APBD Kab.	3.175.000	
269.	132050306013	1-3	Kursi Tunggu	2018	Chairman	210x50 cm	Thickness steel						APBD Kab.	9.750.000	
270.	132050307008	1	Lemari Buffet	2007	TANPA MERK	2 laci	Kayu						APBD Kab.	400.000	Exs. DLH
271.	132050307010	1	Lemari	2008	Elite	3 laci	Besi, seng						APBD Kab.	200.000	
272.	132050307010	1	Lemari panjang di MPP	2019	TANPA MERK	180x65x75 cm	Kayu, Triplek						APBD Kab.	3.800.000	DIGITATA INTERIOR DESIGN
273.	132060101005	1	Amplifier	2007	TOA	120 WAATT	Seng, Elektronik Audio						APBD Kab.	75.000	Exs. DLH
274.	132060101016	1	DVD Radio Kaset	2013	Polytron		ABS Plastik, elektronik						APBD Kab.	1.773.000	
275.	132060101016	2	DVD Radio Kaset	2013	Polytron		ABS Plastik, elektronik						APBD Kab.	1.773.000	
276.	132060101048	1-2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2023	PROLINK	1 KVA	ABS Plastik, Charger						APBD Kab.	5.900.000	
277.	132060101048	3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2023	APC	1 KVA	ABS Plastik, Charger						APBD Kab.	5.250.000	
278.	132060101096	1	Pesawat Telephone	2006	Panasonic	Standard	ABS Plastik						APBD Kab.	164.000	Exs. DPU
279.	132060101096	2	Layar Proyektor	2013	Tanpa merk	220x180 cm	Tripoed Screen Proyektor						APBD Kab.	6.500.000	
280.	132060101096	3	Handycam	2013	Sony		ABS Plastik, lensa						APBD Kab.	8.525.000	RUSAK
281.	132060101096	1	LCD Proyektor	2016	Hitachi		ABS Plastik, lensa						APBD Kab.	9.000.000	
282.	132060101096	1	LCD Proyektor	2019	EPSON		ABS Plastik, lensa						APBD Kab.	11.600.000	
283.	132060101096	2	Layar Proyektor	2019	Tanpa merk	220x180 cm	Tripoed Sreen Proyektor						APBD Kab.	2.500.000	
284.	132060102003	1	Camera Digital	2013	Canon	16 MP	Magnesium Alloy Camera						APBD Kab.	4.000.000	RUSAK
285.	132060102003	2	Camera SLR	2013	Canon	16 MP	Magnesium Alloy Camera						APBD Kab.	8.950.000	
286.	132060102060	1	Kamera Digital	2013	Sony	16 MP	Magnesium Alloy Camera						APBD Kab.	5.000.000	Kamera beserta lensanya
287.	132060102126	1	Camera DSLR	2023	CANON	WITH LENS 18-55MM	ABS Plastik, Lensa Camera						APBD Kab.	15.263.000	
Simbadamas															
														Hal 11 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
288.	132060102126	2	RALLY CAMERA	2023	LOGITECH RALLY	CONFEREN CE GROUP	CAMERA,MICRO SSD						APBD Kab.	23.500.000	
289.	132060102164	1	CAMERA DRONE	2023	DJI AIR FLY MORE COMBO	RC2 FLIGHT BATTERY	ABS Plastik,Micro SSD,Camera						APBD Kab.	28.500.000	
290.	132060104010	1	Mesin Pemotong / Penghancur Kertas	2023	KOZURE	Paper	ABS Plastik,Pemotong Kertas						APBD Kab.	4.300.000	
291.	132060105017	1	Theodolit	2003	NIKON (NE-20S)		Besi						APBD Kab.	50.000.000	
292.	132060105053	1	Alat pengukur (DPC)	2003	TATONAS (Dynamic Cone Penetro		Besi						APBD Kab.	8.000.000	
293.	132060201003	1	Pesawat Telepon	1996	LG		ABS Plastik						APBD Kab.	200.000	EXS. DLH
294.	132060201003	1	Pesawat Telephone	2004	Panasonic	Standard	ABS Plastik						APBD Kab.	200.000	EXS. DLH
295.	132060201003	1	Pesawat Telephone	2006	Panasonic	Standard	ABS Plastik						APBD Kab.	164.000	EXS. DPU
296.	132060201003	2	Pesawat Telephone	2006	Fleksi Home	Standard	ABS Plastik						APBD Kab.	200.000	EXS. DLH
297.	132060201003	3-7	Pesawat Telephone	2006	Panasonic	Standard	ABS Plastik						APBD Kab.	750.000	EXS. DLH
298.	132060201003	6	Pesawat Telephone	2006	Sahitel	Standard	ABS Plastik						APBD Kab.	150.000	EXS. DLH
299.	132060201003	8	Pesawat Telephone	2006	Panasonic	Transfer telpon	ABS Plastik						APBD Kab.	2.000.000	EXS. DLH
300.	132080138030	1	Pompa Air	2013	Shimizu		Besi,peng,radiator						APBD Kab.	669.000	
301.	132080205001	1	Pengadaan Genset	2009	Elemax	5,6 kVA	Besi,Radiator						APBD Kab.	29.856.000	Exs. DLH
302.	132100102001	1	Personal Computer Unit	2012	SIMBADA	149 GB	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	5.000.000	-
303.	132100102001	2	Personal Computer Unit	2012	SAMSUNG	149 GB, 21"	ABS Plastik-Elektronik						APBD Kab.	5.000.000	RUSAK
304.	132100102001	3	Personal Computer Unit (PC)	2012	Acer	21"	Besi-Plastik						APBD Kab.	7.850.000	RUSAK
305.	132100102001	4	Personal Computer Unit (PC)	2012	Acer	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	7.850.000	RUSAK
306.	132100102001	5-7	Personal Computer Unit (PC)	2012	Samsung	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	11.860.000	
307.	132100102001	8	Personal Computer Unit (PC)	2012	ASUS	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	10.350.000	
308.	132100102001	9	Personal Computer Unit (PC)	2012	Asus	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	6.000.000	
309.	132100102001	10	Personal Computer Unit (PC)	2012	Asus	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	8.000.000	-
310.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2013	HP		ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	7.900.000	
311.	132100102001	2	Personal Computer Unit (PC)	2013	Asus		ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	8.855.000	
312.	132100102001	3-7	Personal Computer Unit (PC)	2013	Asus		ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	17.710.000	
313.	132100102001	5-6	Personal Computer Unit (PC)	2013	Asus		ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	13.000.000	
314.	132100102001	8	Personal Computer Unit (PC)	2013	Samsung		ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	8.855.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
315.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2014	HP		ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	5.950.000	
316.	132100102001	2	Personal Computer Unit (PC)	2014	Simbada (casing)	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	8.700.000	
317.	132100102001	3	Personal Computer Unit (PC)	2014	Simbada	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	8.700.000	
318.	132100102001	1	Komputer PC	2015	Dell	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	6.888.750	
319.	132100102001	2-3	Personal Computer Unit (PC)	2015	Asus	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	12.980.000	
320.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2016	Dasumba	Ram 8 GB	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	17.650.000	
321.	132100102001	2	Personal Computer Unit (PC)	2016	Dazumba	Ram 8 GB	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	17.650.000	
322.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2017	D VITO 970	16 GB,21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	26.345.000	
323.	132100102001	2	Personal Computer Unit (PC)	2017	D VITO 970	16 GB, 21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	26.345.000	
324.	132100102001	3	Personal Computer Unit (PC)	2017	D VITO 970	16 GB,21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	26.345.000	
325.	132100102001	4	Personal Computer Unit (PC)	2017	Dell	Ram 4 GB	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	8.723.000	
326.	132100102001	5	Personal Computer Unit (PC)	2017	Dell	8 gb,21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	13.904.000	
327.	132100102001	1-4	Personal Computer Unit (PC)	2018	ASUS	21,5"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	37.998.400	
328.	132100102001	5-6	Personal Computer Unit (PC)	2018	HP	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	19.967.000	
329.	132100102001	7-8	Personal Computer Unit (PC)	2018	Samsung	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	7.900.000	
330.	132100102001	1-2	Personal Computer Unit (PC) AIO	2019	Asus	23,8"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	27.000.000	
331.	132100102001	3-4	Personal Computer Unit (PC) AIO	2019	Asus	23,8"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	33.813.000	
332.	132100102001	1-2	PC All In One (AIO)	2020	Acer	18,5"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	21.600.000	
333.	132100102001	1	P.C / Komputer All in One Core i5	2022	Lenovo	SSD 512 M2 Ram 8GB	ABS Plastik-RangkaiaElektronik						APBD Kab.	16.816.000	
334.	132100102001	1	PC KOMPUTER TOWER	2023	DELL VOSTRO	22 INCH	ABS Plastik,Elektronik						APBD Kab.	16.000.000	
335.	132100102001	2	PC ALL IN ONE	2023	HP	24 INCH	ABS Plastik,Elektronik						APBD Kab.	17.500.000	
336.	132100102001	3-4	PC KOMPUTER ALL IN ONE	2023	HP	27 INCH	ABS Plastik,Elektronik						APBD Kab.	49.800.000	
337.	132100102001	1	PC All In One	2024	HP	24 Inch	ABS Plastik,Monitor,Elektronik						APBD Kab.	19.900.000	
338.	132100102002	1-2	Lap Top	2015	Asus	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	13.090.000	
SimbadaMas														Hal 13 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
339.	132100102002	3-4	Lap Top	2015	Lenovo	15"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	11.660.000	
340.	132100102002	6-7	Lap Top	2015	Lenovo	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	11.660.000	
341.	132100102002	1	Lap Top	2016	FUJITSU	Ram 4 GB,15"	ABS Plastik,Elektronik						APBD Kab.	19.000.000	
342.	132100102002	1	Lap Top	2017	Asus	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	9.064.000	4 GB
343.	132100102002	2	LAP TOP	2017	Asus	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	9.064.000	4 GB
344.	132100102002	3	LAP TOP	2017	Asus	21"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	9.064.000	
345.	132100102002	4	LAP TOP	2017	Asus	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	9.064.000	
346.	132100102002	5	Lap Top	2017	Lenovo	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	5.632.000	
347.	132100102002	1	Lap Top	2018	Asus	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	18.683.500	
348.	132100102002	2-3	Lap Top	2018	Asus	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	19.580.000	
349.	132100102002	1	Laptop DELL INSPIRON	2019	DELL	14 Inch HD(1366x768)	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	7.990.000	
350.	132100102002	1-2	Lap Top	2020	Acer	15,6 "	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	31.720.000	
351.	132100102002	3-5	Note Book	2020	HP	14 "	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	22.200.000	
352.	132100102002	1	Lap Top	2021	ACER	14'	ABS Plastik,Elektronik			NXA2ASN006137 0469D3400			APBD Kab.	15.000.000	
353.	132100102002	1	Lap Top	2022	ASUS	15"	ABS Plastik,Elektronik						APBD Kab.	15.000.000	CV ASTA JAYA
354.	132100102002	2-5	Lap Top	2022	HP PAVILION	RAM 16 GB SSD 512 GB	ABS Plastik,elektronik			P/N 68J07PA#AR6			APBD Kab.	79.254.000	
355.	132100102002	1	Lap Top	2023	HP PAVILION	14 Inch 512 GB SSD	ABS Plastik,Elektronik			68JIOPAWAR6			APBD Kab.	15.000.000	CV. ASTA JAYA
356.	132100102002	2-5	Lap Top	2023	ACER	15,6"	ABS Plastik,Elektronik			AN515-57-921P			APBD Kab.	99.996.000	CV. ASTA JAYA
357.	132100102002	6-9	Lap Top	2023	HP	13,3 INCH	ABS Plastik,Elektronik						APBD Kab.	85.000.000	
358.	132100102002	10	Lap Top	2023	ASUS	Processor Core i7	ABS Plastik,Elektronik						APBD Kab.	24.950.000	
359.	132100102002	11-13	Lap Top	2023	ASUS	14 INCH	ABS Plastik,Elektronik						APBD Kab.	89.850.000	
360.	132100102003	6	Notebook	2011	Acer	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	6.957.500	RUSAK
361.	132100102003	1	Note Book	2012	Toshiba	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	7.500.000	RUSAK
362.	132100102003	2	Note Book	2012	Asus	14"	ABS Platik,elektronik						APBD Kab.	10.700.000	RUSAK
Simbadamas														Hal 14 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
363.	132100102003	6-7	Note Book	2012	Asus	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	20.750.000	RUSAK
364.	132100102003	4	Note Book	2013	Toshiba	14'	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	6.475.000	
365.	132100102003	2	Note Book	2014	Toshiba	14"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	6.875.000	
366.	132100102003	1	Tablet	2018	Aple	9,7" 8 MP	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	6.897.000	
367.	132100102003	1	Note Book	2023	HP	14 Inch	ABS Plastik, Elektronik						APBD Kab.	14.900.000	
368.	132100102009	1-2	Tablet PC	2021	Samsung	RAM 4 GB/ROM 128 GB	ABS Plastik,elektronik	S/N.RR2R3 003C3J		363919/11/878187 /5NA			APBD Kab.	18.000.000	10,4" Inch (Tablet / Ipad)
369.	132100102010	2	Tablet	2014	Samsung Galaxy	10"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	3.730.000	RUSAK
370.	132100102010	1	Tablet	2019	Samsung	10"	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	4.700.000	
371.	132100102010	1-2	PC/KOMPUTER ALL IN ONE CORE i5-1135G7	2021	DELL	HDD 256 GB+1 TB	ABS Plastik,elektronik			GJSKG82			APBD Kab.	31.816.000	
372.	132100201012	1	Harddisk Eksternal	2019	Seagate	4 TB	ABS Plastik,elektronik						APBD Kab.	2.117.500	
373.	132100201012	1-3	Hard Disk External	2022	WD ELEMENTS	1 TB	Rangkaian Elektronik						APBD Kab.	3.750.000	
374.	132100202009	1-2	Scanner	2017	Mobile Office	Standard	ABS Plastik,elektronik,Tinta						APBD Kab.	5.784.000	
375.	132100202009	1	Scanner A3	2019	Epson	4800X1200dpi	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	5.142.000	Scanner A3 untuk Pelayanan di MPP
376.	132100202017	2	Printer	2014	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	4.071.000	RUSAK
377.	132100202017	3	Printer	2014	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	4.071.000	
378.	132100202017	4-6	Printer	2014	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	8.700.000	RUSAK
379.	132100202017	7-8	Printer	2014	HP Laserjet	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	6.032.000	
380.	132100202017	1	UPS	2017	ICA	Standard	ABS Plastik, Elektronik						APBD Kab.	2.348.500	
381.	132100202017	1-2	Printer	2020	HP	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	6.480.000	
382.	132100203002	1	Monitor	2016	Samsung	A 21 "	ABS Plastik,Layar kaca						APBD Kab.	1.950.000	
383.	132100203002	2	Monitor	2016	Asus	A 21 "	ABS Plastik,Layar kaca						APBD Kab.	1.950.000	
384.	132100203002	1-2	Monitor	2018	HP	18,5"	ABS Plastik,Layar kaca						APBD Kab.	2.000.000	
385.	132100203002	3	Monitor	2018	Samsung	18,5"	ABS Plastik,Layar kaca						APBD Kab.	1.000.000	
386.	132100203003	11	Printer	2013	HP	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.795.000	RUSAK
387.	132100203003	12	Printer	2013	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	1.995.000	-
388.	132100203003	1	Printer	2014	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.865.000	-
Simbadamas														Hal 15 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
389.	132100203003	1	Printer	2015	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.985.950	
390.	132100203003	2	Printer	2015	HP	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	3.353.900	
391.	132100203003	3-4	Printer	2015	Brother	A3	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	12.672.000	
392.	132100203003	5	Printer	2015	Brother	A3	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	6.336.000	Rusak
393.	132100203003	8	Printer	2015	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	1.925.000	
394.	132100203003	9-11	Printer	2015	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	5.775.000	RUSAK
395.	132100203003	12	Printer	2015	HP	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	1.094.500	
396.	132100203003	15	Printer	2015	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	7.150.000	
397.	132100203003	1	Printer	2016	Brother	A3	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	6.500.000	
398.	132100203003	2	Printer	2016	Brother	A3	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	6.500.000	
399.	132100203003	2-5	Printer A4	2017	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	7.953.000	
400.	132100203003	4	Printer A4	2017	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.651.000	
401.	132100203003	4	Printer A4	2018	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.486.000	
402.	132100203003	5-7	Printer A3	2018	Epson	A3+	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	19.651.500	
403.	132100203003	8	Printer A4	2018	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.997.500	
404.	132100203003	9	Printer A4	2018	Brother	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.997.500	
405.	132100203003	10-11	Printer A4	2018	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	4.800.100	
406.	132100203003	1	Printer	2019	Epson	A3	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	6.799.000	
407.	132100203003	2	Printer	2019	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.000.000	
408.	132100203003	3	Printer	2019	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.688.000	
409.	132100203003	4	Printer	2019	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	2.688.000	
410.	132100203003	2	Printer	2020	Epson	A3	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	6.925.000	
411.	132100203003	3-6	Printer	2020	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	9.800.000	
412.	132100203003	1	Printer EPSON L1110	2021	EPSON	375x347x169 mm	ABS Plastik,Tinta			C11CG89502			APBD Kab.	2.250.000	
413.	132100203003	1	Printer	2022	Epson	375x347x179 mm	ABS Plastik,Tinta			017.22.0132.513			APBD Kab.	4.500.000	CV ASTA JAYA
414.	132100203003	2-5	Printer	2022	Epson	375x347x179 mm	ABS Plastik,Tinta			017.22.0132.513			APBD Kab.	18.000.000	CV ASTA JAYA
415.	132100203003	6-7	Printer	2022	Epson	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	11.988.000	
416.	132100203003	8-9	Printer	2022	HP	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	8.880.000	
417.	132100203003	10	Printer	2022	Epson	A3 Warna	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	14.944.000	
418.	132100203003	11	Printer	2022	Epson	A3 Hitam	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	11.988.000	
419.	132100203003	1-2	Printer Multifungsi	2023	Brother	A3	ABS Plastik,Tinta			8CH14300140			APBD Kab.	28.000.000	CV. ASTA JAYA
420.	132100203003	3-5	Printer	2023	EPSON	A3	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	53.385.000	
421.	132100203003	6-7	Printer Multifungsi	2023	BROTHER	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	9.480.000	
422.	132100203003	8-9	Printer	2023	EPSON	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	7.030.000	
423.	132100203003	10-11	Printer	2023	EPSON	A4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	6.526.000	
SimbadMas														Hal 16 dari 18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
424.	132100203004	1	Scanner Besar	2019	Fujitsu	A3	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	41.288.000	
425.	132100203004	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2023	BROTHER	F4	ABS Plastik,Tinta						APBD Kab.	11.990.000	
426.	132100203007	1	Hardisk External	2013	Seagate		ABS Plastik						APBD Kab.	990.000	
427.	132100203007	2	Memory	2013	Tanpa Merk		ABS Plastik						APBD Kab.	500.000	RUSAK
428.	132100203007	3	Hardisk External	2013	Seagate		ABS Plastik						APBD Kab.	800.000	RUSAK
429.	132100203007	1	External	2014	Seagate		ABS Plastik						APBD Kab.	1.930.000	
430.	132100203007	1-2	Hardisk External	2016	Seagate		ABS Plastik						APBD Kab.	4.200.000	
431.	132100203007	1-2	Hardisk External	2017	Seagate		ABS Plastik						APBD Kab.	3.520.000	
432.	132100203017	1-3	External/ Portable Hardisk	2023	SEAGATE BARRACUDA	1 TB	ABS Plastik,Micro SSD						APBD Kab.	2.997.000	
433.	132100203018	2	GPS	2012	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	7.400.000	
434.	132100203018	1	GPS	2013	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	4.977.500	
435.	132100203018	2-3	GPS	2013	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	9.955.000	RUSAK
436.	132100204001	1	Perangkat Lunak WEB	2012			ABS Plastik,kabel,elektr onik						APBD Kab.	19.775.000	
437.	132100204003	2	SWITCH/HUB	2013			ABS Plastik						APBD Kab.	3.000.000	
438.	132100204003	3	UTP Kabel Indoor	2013			Kabel						APBD Kab.	1.500.000	
439.	132100204004	1	Modem WIFI GSM 4G LTE	2022	HUAWEI	4G	ABS Plastik						APBD Kab.	966.000	CV.WISUDA
440.	132100204033	1	GPS	2012	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	7.000.000	
441.	132100204033	2	GPS	2012	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	7.000.000	
442.	132100204033	2	GPS	2016	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	7.000.000	
443.	132100204033	3	GPS	2016	Garmin		ABS Plastik,Memory Peta						APBD Kab.	5.650.000	
444.	132110102016	1	Laser Distance Meter Digital	2024	LEICA	Meter	ABS Plastik,Digital Laser						APBD Kab.	5.500.000	
445.	132180102002	1	Pembuatan Papan Maklumat IMB	2012	Tanpa Merk								APBD Kab.	36.173.000	
JUMLAH														7.852.295.985	

Sumber: KIB B DINPERKIM Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024

Tabel 2. 6 Daftar Inventaris Bangunan Gedung DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025

BUKU INDUK KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Intrakomptabel

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANYUMAS
SKPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PENANGGUNG JAWAB :
LOKASI PENANGGUNG JAWAB : Jln. Gerilya Barat No 5

KODE LOKASI

111005010000000000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Kondisi Bangunan (B, KB,RB)	Nomor		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul / Cara	Harga Rp.	Keterangan
						Bertingkat Tidak	Beton/ tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
1.	133010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Utama	1990	B	Tidak	Beton	375,28	Jl.Gerilya Barat No.5 Purwokerto (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas			375,28	Hak Pakai	05.01.00.00.1310101 04001.1995.1	APBD Kab.	1.320.629.310	DCKKTR
2.	133010101001	1	Aula DINPERKIM	2012	B	Tidak	Beton	297,66	Jl. Gerilya Barat No.05 Purwokerto DINPERKIM Kab Banyumas	26/07/2012	027/147/PPK/ VIII/2012	297,66	Hak Pakai		APBD Kab.	888.105.000	Ex.DCKKTR
3.	133010101001	1	Pembangunan Garasi Kantor DINPERKIM Kabupaten Banyumas	2014	B	Bertingkat	Beton	436,7	Garasi Kantor DINPERKIM Kabupaten Banyumas	02/06/2014	027/79/PPK/ BG/VI/2014	436,7	Hak Pakai		APBD Kab.	999.673.000	Ex.DCKKTR
4.	133010101001	1	Bangunan Gedung UPTD PALD Gunung Tugel	2023	B		Beton		RT 04 RW 06 Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja	21/09/2023	050/5374/202 3	82	Hak Pakai		APBD Kab.	449.832.600	Uang Muka 30%
5.	133010101005	1	Pembangunan MCK Umum Komplek Masjid Al Huda Desa Papringan Kec. Banyumas	2008	B	Tidak	Tidak	36	Desa Papringan Kec. Banyumas			36	Hak Pakai		APBD Kab.	48.800.000	
6.	133010101005	2	Pemb. MCK Umum Kab. Banyumas Pekerjaan Perbaikan Lingkungan di Desa Klapagading Kulon Kec. Wangon	2008	B	Tidak	Beton	37	Desa Klapagading Kulon Kec. Wangon			37	Hak Pakai		APBD Kab.	4.812.500	
7.	133010101005	3	Pembangunan MCK Umum Komplek Masjid Nur Huda Desa Karangrau Kec. Sokaraja	2008	B	Tidak	Beton	36	Desa Karangrau Kec., Sokaraja			36	Hak Pakai		APBD Kab.	48.800.000	
8.	133010101005	1	MCK Desa Cipete Kec.Cilongok	2009	B	Tidak	Beton	32	Desa Cipete Kecamatan Cilongok			32	Hak Pakai		APBD Kab.	42.300.000	
9.	133010101005	2	MCK Desa Kalitapen Kec.Purwojati	2009	B	Tidak	Beton	32	Desa Kalitapen Kec.Purwojati			32	Hak Pakai		APBD Kab.	42.642.000	
10.	133010101005	3	MCK Lingk.Darul Hikmah desa Margasana Jatilawang	2009	B	Tidak	Beton	32	Desa Margasana Jatilawang			32	Hak Pakai		APBD Kab.	42.473.000	

SimbadMas

Hal 1 dari 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.	133010101005	4	Pembangunan MCK Umum Komplek Masjid Al Hikmah RW 01 Desa Pliken Kec. Kembaran	2009	B	Tidak	Beton	36	Desa Pliken Kec. Kembaran			36	Hak Pakai		APBD Kab.	48.750.000	DCKKTR
12.	133010101005	5	Pembangunan MCK Umum Desa Kalisube dan Pondok Pesantren Desa Lesmana Kec. Ajibarang	2009	B	Tidak	Beton	78	Desa Kalisube dan Pondok Pesantren Desa Lesmana Kec. Ajibarang			78	Hak Pakai		APBD Kab.	97.691.000	
13.	133010101005	1	Kont./Pemb. Ged.Kntor Pav.Komp.Sngai Rden.aspl Jl.Gn.Slmet.Pav.Komp.Snga i Cban.aspl Jl.Gn.Klud.	2010	RR	Tidak	Tidak	323	Kec.Pwt.Utara			323	Hak Pakai		APBD Kab.	264.799.000	DCKKTR
14.	133010101005	1	Bangunan Lapangan Olahraga Perum Teluk	2015	B	Tidak	Beton	7.000	Perum Teluk Kec. Pwt Selatan			7.000	Hak Pakai		APBD Kab.	74.187.000	
15.	133010101005	1	Halaman Kantor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	2017	B	Tidak	Tidak		Kantor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	17/10/2017	050/621/PPK /2017	20	Hak Pakai		APBD Kab.	69.500.000	
16.	133010101005	1	Bangunan Pos Jaga IPLT	2018	B	Tidak	Beton	9,45	RT 04 RW 06 Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja			3	Hak Pakai		APBD Kab.	27.548.141	22023/LS/BL/2018
17.	133010101005	2	Pavingisasi Halaman Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	2018	B	Tidak	Tidak		Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	26/06/2018	050/263/PPK /2018	87,98	Hak Pakai		APBD Kab.	172.120.000	Permukiman
18.	133010101005	3	Jalan Lingkungan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur	2018	B	Tidak	Tidak	793	Jalan Lingkungan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur	26/06/2018	050/291/PPK /2018	793	Hak Pakai		APBD Kab.	192.420.000	Permukiman
19.	133010102001	1	Gedung Gudang (Ruang Pertemuan DINPERKIM)	2009	B	Tidak	Beton	43,86	Jl. Geniya Barat No. 5			43,86	Hak Pakai		APBD Kab.	37.503.000	
20.	133010102005	1	Bangunan gedung terbuka	1995	B	Tidak	Tidak	100	Jl.Gerilya Barat No 5 Purwokerto			100	Hak Pakai		APBD Kab.	1.500.000	
21.	133010104006	1	Pembangunan Garasi dan Penutupan Saluran Air	2007	B	Tidak	Beton	33,4	Jl. Geniya Barat No. 5			33,4	Hak Pakai		APBD Kab.	44.150.000	
22.	133010104006	1	Pembangunan Septictank Komunal, Jaringan perpipaan dan Penataan Lingkungan Kel. Kranji Kec. Purwoke	2014	B	Tidak	Beton	603,7	Kelurahan Kranji	15/09/2014	027/5010/PP/ IX/2014	603,7	Hak Pakai		APBD Kab.	459.891.500	DCKKTR
23.	133010108001	1	Mushola,Paving Blok	2003	B	Tidak	Tidak	67,32	Jl.Gerilya Barat No. 5 Purwokerto			67,32	Hak Pakai		APBD Kab.	47.000.000	DCKKTR
24.	133010108001	1	Bangunan Masjid Perumahan Griya Satria Mandalatama Tahap I	2021	B	Tidak	Beton	28.000	Kelurahan Pasimmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat	09/09/2021	600/4822/202 1	280	Hak Pakai		Hibah	840.000.000	PT. Bina Agung Damar Buana
25.	133010108001	2	Bangunan Musholla Al-Ikhlas Perumahan Griya Satria Mandalatama Tahap III	2021	B	Tidak	Beton	72	Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas	09/09/2021	600/4824/202 1	72	Hak Pakai		Hibah	50.400.000	PT. Bina Agung Damar Buana
26.	133010108001	3	Bangunan Masjid Perumahan Griya Satria Mandalatama Tahap IV	2021	B	Tidak	Beton	54.678	Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat	09/09/2021	600/4825/202 1	546,78	Hak Pakai		Hibah	1.640.340.000	PT. Bina Agung Damar Buana
Simbademas																	Hal 2 dari 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.	133010108001	4	Bangunan Masjid Perumahan Pasir Indah Tahap I	2021	B	Tidak	Beton	22.100	Desa Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas	09/09/2021	600/4827/2021	221	Hak Pakai		Hibah	375.700.000	PT. Putra Satria Agung
28.	133010108001	5	Bangunan Musholla Perumahan Grand Satria Wiradadi I	2021	B	Tidak	Beton	6.756	Desa Wiradadi, Kecamatan Wiradadi	09/09/2021	600/4829/2021	67,56	Hak Pakai		Hibah	122.000.000	PT. Kanca Lawas Makmur
29.	133010108001	6	Bangunan Musholla Perumahan Bukit Lestari Banteran	2021	B	Tidak	Beton	78,75	Desa Banteran, Kecamatan Sumbang	09/09/2021	600/4830/2021	78,75	Hak Pakai		Hibah	78.750.000	PT. Maha Putra Lestari
30.	133010108001	7	Bangunan Masjid Perumahan Grand Safira Karangsalam	2021	B	Tidak	Beton	213,28	Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng	09/09/2021	600/4833/2021	213,28	Hak Pakai		Hibah	362.576.000	PT. Bianglala Nuansa Persada
31.	133010108001	8	Bangunan Musholla Perumahan Sapphire Estate	2021	B	Tidak	Beton	22.100	Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara	09/09/2021	600/8397/2021	221	Hak Pakai		Hibah	56.700.000	PT. Mitra Sapphire Estate
32.	133010108001	9	Bangunan Musholla Perumahan Sapphire Town House Tahap I	2021	B	Tidak	Beton	70	Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan	09/09/2021	600/8401/2021	70	Hak Pakai		Hibah	70.000.000	PT. Karya Jaya Satria
33.	133010108001	10	Musholla Perumahan Puri Karanggintung	2021	B	Tidak	Beton	300,07	Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang	09/09/2021	600/4835/2021	300,07	Hak Pakai		Hibah	50.000.000	Perumahan Puri Karanggintung
34.	133010108001	11	Bangunan Musholla Perumahan Puri Banteran	2021	B	Tidak	Beton	413,78	Desa Banteran, Kecamatan Sumbang	09/09/2021	600/4836/2021	413,78	Hak Pakai		Hibah	50.000.000	Perumahan Puri Banteran
35.	133010108001	12	Bangunan Musholla Perumahan Paradiso Residence	2021	B	Tidak	Beton	110	Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas	30/12/2021	600/8394/2021	110	Hak Pakai		Hibah	66.654.008	Perumahan Paradiso Residence
36.	133010108001	13	Bangunan Masjid Nurul Ikhlas Perumahan Grand Safira Kalibagor	2021	B	Tidak	Beton	64	Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor	30/12/2021	600/8390/2021	64	Hak Pakai		Hibah	96.000.000	Perumahan Grand Safira Kalibagor
37.	133010108002	1	Masjid Perumahan Bumi Teluk Permai	2019	B	Tidak	Beton	473,86	Kelurahan Teluk, Kecamatan Sokaraja	15/05/2019	600 / 20 / 2019	473,86	Hak Pakai		Hibah	236.930.000	PT Bumi Citra Satria
38.	133010108002	2	Masjid Al Furqon Perumahan Firdaus Estate	2019	B	Tidak	Beton	300	Desa Sokaraja Kulon dan Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja	15/05/2019	600 / 21 / 2019	300	Hak Pakai		Hibah	150.000.000	PT Indorizky Abadi Maju Sejahtera
39.	133010108002	1	Musholla Perumahan Puri Teluk	2020	B	Tidak	Beton	277,9	Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan	27/01/2020	600 / 14 / 2020	277,9	Hak Pakai		Hibah	138.950.000	PT Indracipta Punsatria
40.	133010108002	2	Musholla Perumahan Cluster Ciberem 1	2020	B	Tidak	Beton	93,54	Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang	27/01/2020	600 / 17 / 2020	93,54	Hak Pakai		Hibah	46.770.000	PT Kanca Lawas Makmur Sejahtera
41.	133010108002	3	Musholla Perumahan Grand Satria Wiradadi 2 Tahap 1	2020	B	Tidak	Beton	267,68	Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja	27/01/2020	600 / 19 / 2020	267,68	Lain-lain		Hibah	133.840.000	PT Kanca Lawas makmur sejahtera
42.	133010108002	11	Sarana ibadah Perumahan Duta Graha Golden Wisata Tahap I	2021	B	Tidak	Beton	196	Desa Karanggintung, Kec Sumbang	29/12/2021	050/136/2021	196	Lain-lain		Hibah	283.500.000	PT. Dutaserana Cipta Sejahtera
43.	133010108004	1	Masjid Perumahan Griya Satria Sumampir 1	2020	B	Tidak	Beton	750,95	Perumahan Griya Satria Sumampir 1 Kelurahan Sumampir Kec.Purwokerto Utara	14/07/2020	050/3078.5/2020	750,95	Hak Pakai		Hibah	375.475.000	PSU Tahun 2020
Simbademas Hal 3 dari 8																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44.	133010108004	2	Masjid Perumahan Griya Satria Sumampir 2 Tahap 1	2020	B	Tidak	Beton	450	Perumahan Griya Satria Sumampir 2 Tahap 1 Kelurahan Sumampir Kec.Purwokerto Utara	14/07/2020	050/3078.6/2020	450	Hak Pakai		Hibah	1.125.000.000	PSU Tahun 2020
45.	133010108004	3	Masjid Perumahan Griya Satria Saga Baru Kel. Kober	2020	B	Tidak	Beton	126	Perumahan Griya Satria Saga Baru Kelurahan Kober Kec.Purwokerto Barat	14/07/2020	050/3078.3/2020	126	Hak Pakai		Hibah	315.000.000	PSU Tahun 2020
46.	133010108004	4	Masjid Perumahan Griya Satria Bancarkembar	2020	B	Tidak	Beton	324	Perumahan Griya Satria Bancarkembar Kelurahan Bancarkembar Kec.Purwokerto Utara	17/06/2020	050/2560/2020	324	Hak Pakai		Hibah	162.000.000	PSU Tahun 2020
47.	133010108004	5	Masjid Perumahan Griya Satria Bantarsoka Tahap 1	2020	B	Tidak	Beton	872	Perumahan Griya Satria Bantarsoka Tahap 1 Kelurahan Bantarsoka Kec.Purwokerto Barat	17/06/2020	050/2560.3/2020	872	Hak Pakai		Hibah	436.000.000	PSU Tahun 2020
48.	133010111008	1	Tembok Pagar Lapangan RT 01/04 Kel.Sumampir Kec.Purwokerto Utara.	2017	B	Tidak	Tidak	116	Lapangan RT 01/04 Kel.Sumampir Kec.Purwokerto Utara.			116	Hak Pengelolaan		APBD Kab.	99.500.000	
49.	133010111008	1	Tembok Keliling Lapangan Olah Raga Kelurahan Teluk Kec. Purwokerto Selatan	2018	B	Tidak	Tidak	253	Kelurahan Teluk Kec. Purwokerto Selatan	26/06/2018	050/338/PPK/2018	253	Hak Pengelolaan		APBD Kab.	180.750.000	Pengembangan Permukiman
50.	133010130002	1	Pagar Makam Pekih RW 03 Kelurahan Sokanegara	2023	B		Beton		MAKAM PEKIH RW 03 Kelurahan Sokanegara Kec.Purwokerto Timur	18/08/2023	050/4220/PP KOM/2023	10,5	Lain-lain		APBD Kab.	56.966.000	
51.	133010130002	2	Pagar Makam Watu Kuning Kelurahan Rejasari	2023	B		Beton		Makam Watu Kuning Kelurahan Rejasari Kec. Pwt Barat	27/10/2023	050/7083/PP KOM/2023	93	Lain-lain		APBD Kab.	99.805.000	
52.	133010130005	1	Pintu Tralis Besi	1995	B	Tidak	Beton	12	(DINPERKIM)			12	Hak Pakai		APBD Kab.	8.715.000	
53.	133010130005	1	Tembok Keliling Makam Archawinangun	2016	B	Tidak	Tidak	340	Tembok Keliling Makam Archawinangun Kelurahan Arcawinangun			340	Hak Pakai		APBD Kab.	147.405.000	Bidang Kebersihan
54.	133010130005	2	Tembok Keliling Makam Karangobar Kel. Sokanegara	2016	B	Tidak	Tidak	205,95	Tembok Keliling Makam Karangobar Kel. Sokanegara			205,95	Hak Pakai		APBD Kab.	89.091.000	Bidang Kebersihan
55.	133010130005	3	Tembok Keliling Makam Kelurahan Kebokura	2016	B	Tidak	Tidak	154,7	Tembok Keliling Makam Kelurahan Kebokura			154,7	Hak Pakai		APBD Kab.	59.536.000	Bidang Kebersihan
56.	133010130005	1	Tembok Keliling RT 06 / 03 Kel. Purwanegara	2017	B	Tidak	Tidak	84	Tembok Keliling RT 06 / 03 Kel. Purwanegara			84	Hak Pakai		APBD Kab.	194.950.000	
57.	133010130005	1	Tembok Keliling Makam Jl.Tanjilg RT 05/09 Kelurahan Sokanegara Kec.Purwokerto Timur	2019	B	Tidak	Tidak	225	Makam Jl.Tanjilg RT 05/09 Kelurahan Sokanegara	26/08/2019	050/3098/2019	225	Hak Pakai		APBD Kab.	223.969.000	CV PUTRA MANDIRI
Simbademas Hal 4 dari 8																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
58.	133010130005	2	Pagar Makam RT 06/RW 04 Sebelah Barat Pasar Manis Kelurahan Kedungwuluh Kec.Purwokerto Barat	2019	B	Tidak	Tidak	280	Makam RT 06 RW 04 Kelurahan Kedungwuluh	01/08/2019	050/292/PPK/2019	280	Hak Pakai		APBD Kab.	198.180.000	CV SENTOSA KARYA
59.	133010130005	3	Pagar Makam Kober Utara Kelurahan Kober Kec.Purwokerto Barat	2019	B	Tidak	Tidak	334	Makam Kober Utara Kelurahan Kober	01/08/2019	050/293/PPK/2019	334	Hak Pakai		APBD Kab.	98.800.000	CV KALINGGA RAYA
60.	133010130005	4	Rumah Keranda,Gapura Infrastruktur Makam Kaliputih	2019	B	Tidak	Tidak	124	Makam Kaliputih Kelurahan Purwokerto Wetan	26/08/2019	14451/LS/BL/2019	124	Hak Pakai		APBD Kab.	389.017.000	CV DICI CENDIKIATAMA
61.	133010137001	1	Sarpras Makam Djaka Kahiman Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas	2022	B	Tidak	Beton	208	Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas	16/06/2022	050/ 1971 / PPKOM / 2022	208	Lain-lain		APBD Kab.	199.379.000	CV. Pandawa Jaya
62.	133010137001	1	Gapura dan Tembok Keliling Kompleks Makam Karangsempu RT 07 RW 06 Kelurahan Kober Kec.Pwt Barat	2023	B		Beton		Makam Karangsempu RT 07 RW 06 Kelurahan Kober Kec.Pwt Barat	27/10/2023	050/7028/PP KOM/2023	136,86	Lain-lain		APBD Kab.	145.193.000	
63.	133010204004	1	Rumah Tinggal	2017	B	Tidak	Tidak	630	Desa Watugung Kec. Tambak	31/08/2107	050/1114/2017	630	Hak Pakai		APBD Kab.	1.310.361.000	Pengembangan Permukiman
64.	133010204004	1	Rumah Tinggal Warga Akibat Bencana Desa Watugung dan Sarpras	2018	B	Tidak	Tidak	15	Desa Watugung	23/08/2018	050/1788/2018	15	Hak Pakai		APBD Kab.	759.444.000	Pengembangan Permukiman
65.	133010204004	2	Tembok Keliling Makam Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan	2018	B	Tidak	Tidak	248,2	Makam Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan	26/06/2018	050/341/PPK/2018	248,2	Hak Pakai		APBD Kab.	161.600.000	Pengembangan Permukiman
66.	133010204004	3	Pagar Makam Kelurahan Kebokura Kec. Sumpiuh	2018	B	Tidak	Tidak	162,75	Makam Kelurahan Kebokura Kec. Sumpiuh	26/06/2018	050/343/PPK/2018	162,75	Hak Pakai		APBD Kab.	105.890.000	Pengembangan Permukiman
67.	133010204004	4	Makam Umum Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat	2018	B	Tidak	Tidak	179,58	Makam Kel. Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat	26/06/2018	050/342/PPK/2018	179,58	Hak Pakai		APBD Kab.	133.840.000	Pengembangan Permukiman
68.	133010204004	5	Tembok Keliling RT 01 RW 06 Kel. Pasirmuncang Kec. Purwokerto Barat	2018	B	Tidak	Tidak	55,5	Kel. Pasirmuncang Kec. Purwokerto Barat	26/06/2018	050/340/PPK/2018	55,5	Lain-lain		APBD Kab.	111.650.000	Pengembangan Permukiman
69.	133010204004	6	Pagar Makam RT 04 RW 02 (Makam Benda) Kel. Sumpiuh Kec. Sumpiuh	2018	B	Tidak	Tidak	130,5	Makam Benda Kelurahan Sumpiuh Kec. Sumpiuh	26/06/2018	050/339/PPK/2018	130,5	Hak Pakai		APBD Kab.	74.900.000	Pengembangan Permukiman
70.	133010204004	7	Tembok Keliling Makam RW 06 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat	2018	B	Tidak	Tidak	74,16	Makam RW 06 Kelurahan Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat	26/06/2018	050/340/PPK/2018	74,16	Hak Pakai		APBD Kab.	49.700.000	Pengembangan Permukiman
71.	133010204004	8	Pagar RT 2 RW 9 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara	2018	B	Tidak	Tidak	290,7	RT 2 RW 9 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara			290,7	Lain-lain		APBD Kab.	189.800.000	Pengembangan Permukiman
72.	133010204004	9	Tembok makam Kelurahan Kranji Kec. Purwokerto Timur	2018	B	Tidak	Tidak	136,5	Makam Kelurahan Kranji Kec. Purwokerto Timur	02/11/2018	050/773/PPK/2018	136,5	Hak Pakai		APBD Kab.	102.270.000	Pengembangan Permukiman
73.	133020103004	1	Makam Kyai Singadipa Desa Panembangan Kec. Cilongok	2022	B	Tidak	Beton	6	Desa Panembangan Kec. Cilongok	18/10/2022	050 / 4506 / PPKOM / 2022	6,3	Hak Pakai		APBD Kab.	199.528.000	
Simbademas																	
																Hal 5 dari 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74.	133020103005	1	Makam Joko Kaiman Desa Dawuhan Kec. Banyumas	2020	B	Tidak	Tidak	30	Makam Joko Kaiman Desa Dawuhan Kec. Banyumas	05/08/2020	050/113/PPK/2020	30	Hak Pakai		APBD Kab.	198.306.000	Pengembangan Permukiman
75.	133020103005	2	Tembok Keliling RT 3 RW 1 Kel. Bancarkembar Kec. Purwokerto Utara	2020	B	Tidak	Tidak	150,19	RT 3 RW 1 Kel. Bancarkembar	26/10/2020	050/218/PPK/UM/2020	150,19	Hak Pakai		APBD Kab.	96.341.000	Pengembangan Permukiman
76.	133020103005	4	Tembok Keliling Makam Sasorogolayu RT 04 RW 02 Kel. Pasimuncang Kec. Purwokerto Bar	2020	B	Tidak	Tidak	135,6	Makam Sasorogolayu RT 04 RW 02 Kelurahan Pasimuncang Kec. Purwokerto Barat	26/10/2020	050/278/PPK/UM/2020	135,6	Hak Pakai		APBD Kab.	168.593.000	Pengembangan Permukiman
77.	133020103005	7	Makam Kyai Singadipa Panembangan Kec. Cilongok	2020	B	Tidak	Tidak	24	Makam Kyai Singadipa Desa Panembangan Kec. Cilongok	21/12/2020	050/8218/PPK/UM/2020	24	Hak Pakai		APBD Kab.	40.201.000	Pengembangan Permukiman
78.	133020103005	9	Tembok Keliling Makam Klawuampo RT 01 RW 03 Kel. Pasimuncang Kec. Purwokerto Barat	2020	B	Tidak	Tidak	145	Makam Klawuampo RT 01 RW 03 Kelurahan Pasimuncang Kec. Purwokerto Barat	05/11/2020	050/279/PPK/UM/2020	145	Lain-lain		APBD Kab.	168.734.000	Pengembangan Permukiman
79.	133020104001	1	Pagar Makam RT 02 RW 04 Kel. Sumpuluh	2017	B	Tidak	Tidak	130,5	Makam RT 02 RW 04 Kelurahan Sumpuluh			130,5	Lain-lain		APBD Kab.	74.900.000	Pengembangan Permukiman
80.	133020104001	2	Pagar Keliling Makam RW 03 Kel. Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat	2017	B	Tidak	Tidak	126	Makam RW 03 Kelurahan Pasir Kidul Kec. Purwokerto Barat			126	Lain-lain		APBD Kab.	74.600.000	Pengembangan Permukiman
81.	133020104001	3	Tembok Keliling Kuburan Utara Pasar Manis Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat	2017	B	Tidak	Tidak	325,14	Kuburan Utara Pasar Manis Kelurahan Kedungwuluh Kec. Purwokerto Barat			325,14	Lain-lain		APBD Kab.	149.500.000	Pengembangan Permukiman
82.	133020104001	4	Tembok Keliling Makam Kel. Bobosan Kec. Purwokerto Utara	2017	B	Tidak	Tidak	9.975	Makam Kelurahan Bobosan Kec. Purwokerto Utara			9.975	Lain-lain		APBD Kab.	99.500.000	Pengembangan Permukiman
83.	133020104001	5	Tembok Makam Kelurahan Karangwangkal Kec. Purwokerto Utara	2017	B	Tidak	Tidak	171	Makam Kelurahan Karangwangkal Kec. Purwokerto Utara			171	Lain-lain		APBD Kab.	154.800.000	Pengembangan Permukiman
84.	133020104001	6	Pembangunan Penguat Tebing Makam Kober Selatan RT 01 RW 01 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Bara	2017	B	Tidak	Tidak	92,22	Makam Kober Selatan RT 01 RW 01 Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat			92,22	Lain-lain		APBD Kab.	119.365.000	Pengembangan Permukiman
85.	133040101012	1	Patok GSB	2009	B	Tidak	Beton	230	Kecamatan Baturaden Kab. Banyumas			230	Lain-lain		APBD Kab.	38.700.000	Penataan Ruang-DCKTR
86.	133040103004	4	Tembok Makam Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan	2021	B	Tidak	Tidak	120	Makam Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan	09/07/2021	050/76/PBJ-S PK/II/2021	120	Lain-lain		APBD Kab.	145.425.000	
87.	133040103004	5	Tembok Makam Bantarmangu, Karangmalang Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	2021	B	Tidak	Tidak	171,6	Makam Bantarmangu, Karangmalang Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	20/08/2021	027/3691/2021	171,6	Lain-lain		APBD Kab.	163.641.546	
Simbademas																	
																Hal 6 dari 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
88.	133040103004	6	Tembok Makam Bantarmangu, Karangmangan g Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	2021	B	Tidak	Tidak	171,6	Makam Bantarmangu, Karangmangan g Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	20/08/2021	027/3891 /2021	171,6	Lain-lain		APBD Kab.	70.132.091	
89.	133040103004	7	Tembok Kelling Makam Lesanpura Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	2021	B	Tidak	Tidak	60	Makam Lesanpura Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	15/07/2021	050/149/PPK/UM/2021	60	Lain-lain		APBD Kab.	145.918.000	
90.	133040103004	8	Tembok Kelling Makam Nirwana Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan	2021	B	Tidak	Tidak	60	Makam Nirwana Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan	15/07/2021	050/139/PPK/UM/2021	60	Lain-lain		APBD Kab.	99.543.000	
91.	133040103004	9	Sarana dan Prasarana Lapangan Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan	2021	B	Tidak	Tidak	100	Lapangan Kelurahan Karanglesem Kecamatan Purwokerto Selatan	12/08/2021	050/164/PPK/UM/2021	100	Lain-lain		APBD Kab.	119.720.000	
92.	133040103004	11	Rehabilitasi Makam Kyai Singadipa Panembangan Kecamatan Cilongok	2021	B	Tidak	Tidak	45	Makam Kyai Singadipa Panembangan Kecamatan Cilongok	15/07/2021	050/140/PPK/UM/2021	45	Lain-lain		APBD Kab.	198.497.000	
93.	133040103004	12	Tembok Kelling Perumnas Teluk Komplek Mahoni Raya Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	2021	B	Tidak	Tidak	191,9	Perumnas Teluk Komplek Mahoni Raya Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan	15/07/2021	050/141/PPK/UM/2021	191,9	Lain-lain		APBD Kab.	149.351.000	
94.	133040103004	13	Sarana dan Prasarana Makam JL.Riyanto Rw.06 Kelurahan Sumampir Kec.Pwt Utara	2021	B	Tidak	Tidak	151,2	Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara	16/09/2021	050/283/PPK/UM/2021	151,2	Lain-lain		APBD Kab.	169.949.000	
95.	133040103004	14	Sarana dan Prasarana Makam Kober Utara Kelurahan Kober Kec.Purwokerto Utara	2021	B	Tidak	Tidak	130	Kelurahan Kober Kec.Purwokerto Utara	18/11/2021	050/392/PPK/UM/2021	130	Lain-lain		APBD Kab.	145.168.000	
96.	133040103004	15	Sarana dan Prasarana Makam Depok RT 5 RW 2 Kelurahan Rejasari Kec.Purwokerto Barat	2021	B	Tidak	Tidak	115,2	Kelurahan Rejasari Kec.Purwokerto Barat	11/11/2021	050/393/PPK/UM/2021	115,2	Lain-lain		APBD Kab.	111.438.000	
97.	133040103004	16	Sarpras Makam RW 2 Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara	2021	B	Tidak	Tidak	149,5	Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara	11/11/2021	050/394/PPK/UM/2021	149,5	Lain-lain		APBD Kab.	196.745.000	
98.	133040103004	2	Pembangunan Gapura Kampung KB RW 01 dan Penanganan Jalan Gg. Melalui Kelurahan Kober Kec. Pwt Barat	2022	B	Tidak	Beton	45,96	Kelurahan Kober Kec. Pwt Barat	28/09/2022	050 / 4218.b / PPKOM / 2022	45,96	Lain-lain		APBD Kab.	96.909.000	
99.	133040103004	3	Sarpras Makam Singaperbangsa Tahap 2 Kelurahan Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat	2022	B	Tidak	Beton	195	Kelurahan Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat	12/09/2022	050 / 3975 / PPKOM / 2022	195	Lain-lain		APBD Kab.	193.464.000	
Simbademas																	
																Hal 7 dari 8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100.	133040103004	4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam Kober Utara RT 08 RW 04 Kelurahan Kober Kec. Purwokerto Bara	2022	B	Tidak	Beton	90	Kelurahan Kober Kec. Purwokerto Barat	31/08/2022	050 / 3765 / PPKOM / 2022	90	Lain-lain		APBD Kab.	145.283.000	
101.	133040103004	5	Sarana dan Prasarana Makam Kober Selatan RT 01 RW 01 Kelurahan Kober Kec. Purwokerto Barat	2022	B	Tidak	Beton	120	Kelurahan Kober Kec. Purwokerto Barat	09/11/2022	050 / 4991 / PPKOM / 2022	120	Lain-lain		APBD Kab.	145.241.000	
102.	133040104001	1	Tembok Keilling Kantor UPTD PALD Gunung Tugel	2023	B		Beton		RT 04 RW 06 Desa Kedungrandu Kec.Patikraja	10/11/2023	050/7736/PPKOM/2023	73,93	Lain-lain		APBD Kab.	194.645.000	
103.	133040104001	1	Pagar Makam Watu Kuning Kelurahan Rejasari	2024	B		Beton		Makam Watu Kuning Kelurahan Rejasari	20/06/2024	000.3.2/5347/2024	86,26	Lain-lain		APBD Kab.	96.872.000	
104.	133040104001	2	Tembok Keilling Makam Nirwana Loka RT 05 RW 03 Kelurahan Purwokerto Kulon	2024	B		Beton		Makam Nirwana Loka Kelurahan Purwokerto Kulon	20/06/2024	000.3.2/5348/2024	99,84	Lain-lain		APBD Kab.	96.795.000	CV. Sinar Karunia
105.	133040104002	2	Pagar Makam Karangsempu RW 06 Kelurahan Kober	2024	B		Beton		Makam Karangsempu RW 06 Kelurahan Kober	20/06/2024	000.3.2/5359/2024	70,8	Lain-lain		APBD Kab.	116.080.000	
106.	133040104004	1	Pembangunan Sarpras Lapangan Kelurahan Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat	2022	B	Tidak	Beton	111,28	Kelurahan Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat	12/08/2022	050 / 3468 / PPKOM / 2022	111,28	Lain-lain		APBD Kab.	193.622.000	
107.	133040104004	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam RW 02,06 Kelurahan Kedungwuluh Kec.Purwokerto Barat	2022	B	Tidak	Beton	96,45	Kelurahan Kedungwuluh Kec.Purwokerto Barat	09/09/2022	050 / 3952 / PPKOM / 2022	96,45	Lain-lain		APBD Kab.	145.278.000	
108.	133040105001	1	Pembangunan Gapura Jalan Rajawali,Gg. Puter dan Penanganan Jalan Gg.Kenari,Gg.Pudak,Gg.Murai Kel.Kob	2022	B	Tidak	Beton	25,6	Kelurahan Kober Kec. Purwokerto Barat	04/10/2022	050 / 4328 / PPKOM / 2022	25,6	Lain-lain		APBD Kab.	145.361.000	
JUMLAH																22.746.569.696	

Sumber: KIB C DINPERKIM Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2024

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis DINPERKIM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari aspek teknis, regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun keterbatasan sumber daya. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur permukiman, tetapi juga mencakup kesenjangan pelayanan dasar, seperti akses terhadap air minum, sanitasi, dan hunian layak. Selain itu, dinamika pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, serta kebutuhan akan kepastian hukum di bidang pertanahan, turut memengaruhi kinerja dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh DINPERKIM Kabupaten Banyumas.

Berbagai permasalahan tersebut berkembang menjadi isu-isu strategis yang perlu dicermati secara komprehensif karena berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis menjadi landasan penting dalam perumusan arah kebijakan, strategi, dan program kerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas ke depan agar lebih responsif, terarah, dan tepat sasaran.

2.5.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINPERKIM Kabupaten Banyumas

Permasalahan di Kabupaten Banyumas yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, serta yang termuat dalam Bab II Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banyumas, antara lain sebagai berikut:

1. Rumah Tidak Layak Huni

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,95%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,53%. Meskipun mengalami perbaikan, angka tersebut masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.

Selain itu, kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 6,83% berhasil ditekan secara signifikan hingga mencapai 1,02% pada tahun 2024. Namun, capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 0,89%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Banyumas telah menunjukkan hasil positif, tetapi tetap memerlukan penguatan kebijakan serta intervensi yang lebih terarah agar dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan.

Salah satu permasalahan mendasar yang menghambat percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Banyumas adalah belum terpenuhinya cakupan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat miskin. Hingga tahun 2024, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah mencapai 25.752 unit. Namun demikian, masih terdapat sekitar 73.016 unit RTLH yang belum tertangani, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi.

Apabila mengacu pada alokasi anggaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang hanya mampu menangani sekitar 494 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) per tahun, maka secara teoritis diperlukan waktu kurang lebih 147 tahun untuk menuntaskan seluruh RTLH yang masih tersisa. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang sangat signifikan antara kebutuhan riil di lapangan dengan kapasitas pembiayaan daerah, sehingga menuntut adanya terobosan kebijakan, optimalisasi sumber pendanaan alternatif, serta penguatan sinergi lintas sektor.

Namun demikian, angka tersebut masih berpotensi mengalami perubahan seiring dengan dilaksanakannya proses verifikasi dan validasi data di lapangan. Hal ini disebabkan karena data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersedia saat ini belum sepenuhnya valid, belum bersifat real time, serta belum terintegrasi dalam satu sistem informasi yang andal. Oleh karena itu, penguatan basis data dan pengembangan sistem informasi perumahan yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung perumusan kebijakan serta pelaksanaan intervensi yang lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Berikut disajikan capaian atau realisasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banyumas selama periode 2016–2024 yang dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Realisasi Penanganan RTLH

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	APBD Kab. Banyumas	3.129	681	712	671	-	347	231	135	1387	7.293
2	Bankeupemdes. Prov. Jateng	240	718	903	903	468	487	491	770	761	5.741
3	BSPS	1.026	302	566	795	1.230	420	485	1234	1282	7.340
4	DAK Perumahan	-	-	185	178	195	139	-	-	-	697
5	BAZNAS RI	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
6	BAZNAS KAB	-	301	82	228	-	-	48	124	75	858

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
7	BAZNAS PROV	-	-	-	-	-	-	-	40	47	87
8	CSR	-	104	-	-	5	2	3	100	133	347
9	LAZIZNU	-	-	-	-	-	5	7	-	-	12
10	RTSTLH BTT	-	-	-	-	-	799	301	-	-	1.100
11	Dana Desa	-	1.472	351	-	-	243	66	72	130	2.262
12	Filantropi/OPD	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Total		4.395	3.578	2.799	2.775	1.898	2.442	1.632	2486	3.819	25.752

Akses terhadap hunian yang layak tidak hanya berdampak pada kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan hunian layak memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks akibat keterbatasan dukungan pembiayaan, belum meratanya intervensi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganannya. Dengan kondisi tersebut, penyediaan rumah layak huni perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ke depan.

Upaya penanganan perlu dilakukan melalui pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta partisipasi masyarakat. Intervensi yang tepat dan berkelanjutan di sektor perumahan diharapkan dapat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan mendukung tercapainya kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas.

2. Masih terdapat kawasan kumuh di areal perkotaan

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 660/1094 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh, Kabupaten Banyumas memiliki kawasan permukiman kumuh seluas 115,67 hektare. Hingga tahun 2024, kawasan kumuh yang telah tertangani mencapai 64,12 hektare, sehingga masih tersisa sekitar 51,58 hektare yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan kumuh. Selain itu, kawasan kumuh dengan luasan

di atas 10 hektare tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DINPERKIM Kabupaten Banyumas secara aktif mengikuti Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2020–2024, DINPERKIM Kabupaten Banyumas berhasil meraih berbagai prestasi, yang memberikan manfaat berupa dukungan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ke depan, Keputusan Bupati Banyumas tentang Kawasan Permukiman Kumuh direncanakan akan dilakukan pembaruan melalui pendataan ulang kawasan perkotaan, yang selanjutnya akan ditetapkan kembali melalui Keputusan Bupati Banyumas pada tahun 2026, guna memastikan keakuratan data dan efektivitas perencanaan penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

2.5.2. Telaah Isu Permasalahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Belum Meratanya Akses Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan akses terhadap perumahan layak, sanitasi, air bersih, serta infrastruktur permukiman masih menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, masih tingginya angka kemiskinan ekstrem, serta terbatasnya kesempatan bagi masyarakat untuk hidup secara produktif dan sehat.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi pembangunan yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan guna memperkecil kesenjangan akses pelayanan dasar, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif di Kabupaten Banyumas.

2.5.3. Telaah Isu Permasalahan Provinsi dan Nasional

Berdasarkan permasalahan yang termuat dalam dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN Tahun 2025–2029, terdapat beberapa isu permasalahan strategis yang perlu ditelaah dan disinergikan penanganannya sebagai isu bersama, antara lain sebagai berikut:

1. Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Permasalahan kawasan permukiman kumuh serta keberadaan rumah tidak layak huni masih menjadi isu krusial dalam pembangunan daerah. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan permukiman kumuh memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan kualitas lingkungan hunian, penyediaan infrastruktur dasar, serta dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

2. Backlog Perumahan dan Rumah Terdampak Bencana

Backlog atau kekurangan pasokan rumah layak huni masih tergolong tinggi, serta sistem penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pembangunan nasional belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan program perumahan yang berbasis kebutuhan lokal, terintegrasi dengan aspek ketahanan bencana, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor yang lebih kuat.

3. Pengelolaan Pertanahan

Pengelolaan pertanahan yang belum optimal, termasuk perlunya percepatan sertifikasi aset daerah, penjaminan legalitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, serta peningkatan transparansi dan keadilan dalam penataan ruang dan penggunaan lahan, menjadi isu penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kepastian hukum.

2.5.4. Telaah Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara untuk dipenuhi secara minimal oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penerapan SPM berfungsi sebagai acuan wajib dalam penyediaan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut mencakup beberapa urusan pemerintahan wajib, salah satunya adalah urusan Perumahan Rakyat.

Pada urusan Perumahan Rakyat, SPM mengamanatkan penyediaan layanan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin. Selain itu, pemenuhan standar mutu pelayanan juga mencakup penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana serta masyarakat yang

terdampak relokasi akibat pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan rehabilitasi maupun penyediaan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kelayakan huni bagi kelompok masyarakat rentan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, implementasi SPM pada urusan Perumahan Rakyat merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di daerah. Oleh karena itu, pemenuhan SPM menjadi prioritas yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dalam memberikan pelayanan publik yang layak dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

2.5.5. Telaahan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan peran DINPERKIM agar selaras dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera.”

Visi tersebut mengandung tiga nilai utama yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu:

Produktif, yaitu mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Adil, menggambarkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan layanan dasar tanpa diskriminasi, termasuk pemerataan akses terhadap rumah layak huni, air minum, dan sanitasi.

Sejahtera, yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan

dasarnya, hidup sehat, aman, dan nyaman melalui penyediaan hunian yang layak serta lingkungan permukiman yang berkualitas.

Ketiga nilai tersebut saling berkaitan dan menjadi arah strategis dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
2. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
3. Meningkatnya ketahanan pangan
4. Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing
6. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

DINPERKIM Kabupaten Banyumas memiliki peran strategis dalam mendukung Misi ke-4, yaitu meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta turut berkontribusi dalam pencapaian Misi ke-2 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perumahan kawasan permukiman, dan pertanahan, khususnya melalui penyediaan rumah layak huni, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penguatan infrastruktur permukiman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.

Melalui intervensi tersebut, DINPERKIM tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan hunian layak dan infrastruktur dasar permukiman menjadi instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, peran DINPERKIM menjadi bagian integral dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2.5.6. Penentuan Isu – Isu Strategis DINPERKIM Kab. Banyumas

RENCANA STRATEGIS DINPERKIM 2025 – 2029

Penentuan isu-isu strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Proses ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program yang dirumuskan benar-benar relevan, tepat sasaran, serta mampu menjawab permasalahan aktual dan tantangan ke depan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

Identifikasi isu strategis tersebut didasarkan pada berbagai aspek, antara lain hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, analisis terhadap kondisi dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta dinamika lingkungan eksternal yang meliputi kebijakan nasional dan provinsi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan wilayah, dan keterbatasan sumber daya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, isu strategis yang ditetapkan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas DINPERKIM Kabupaten Banyumas, sehingga pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada periode 2025–2029 dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Tabel 2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis DINPERKIM berdasarkan telaah Isu KLHS, Provinsi, Nasional, serta Isu Global (SDG's)

No.	Permasalahan	Potensi	Isu KLHS	Isu Provinsi	Isu Nasional	Isu Global	Isu Strategis
1.			Belum Meratanya Akses Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	- Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh - Kelengkapan bangunan pelengkap jalan	Isu Pembangunan Perkotaan: Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola	Mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (SDG's)	Peningkatan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
2.			Belum Meratanya Akses Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	- Penanganan Rumah Tidak Layak Huni - Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni (Backlog) - Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Isu Pembangunan Perdesaan: Perekonomian dan kemiskinan, Kesenjangan Pelayanan dan Relasi Desa-Kota	Mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (SDG's)	Peningkatan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat
3.			Belum Meratanya Akses Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia dan	Pengelolaan Pertanahan	Isu Pembangunan Perkotaan: Kontribusi Ekonomi Perkotaan	Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi	Kualitas Perumahan dan Pertanahan

No.	Permasalahan	Potensi	Isu KLHS	Isu Provinsi	Isu Nasional	Isu Global	Isu Strategis
			Kesejahteraan Masyarakat		terhadap Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur, Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola Isu Pembangunan Perdesaan: Perekonomian dan kemiskinan, Kesenjangan Pelayanan dan Relasi Desa-Kota	yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat inovasi (SDG's)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada Bab II, serta memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2029 sebagai arah dan fokus pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINPERKIM Kab. Banyumas

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 didasarkan pada hasil analisis terhadap isu-isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Analisis tersebut mencakup permasalahan aktual, capaian kinerja periode sebelumnya, tantangan pembangunan ke depan, serta dinamika lingkungan strategis baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

3.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas sebagai hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam jangka menengah. Dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, tujuan yang ingin dicapai oleh DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel”

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- 1) Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
- 2) Rasio Permukiman Layak Huni
- 3) Rasio Rumah Layak Huni

3.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara lebih terukur sebagai perwujudan dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sasaran DINPERKIM Kabupaten Banyumas disusun untuk menggambarkan capaian *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Adapun sasaran yang ingin dicapai DINPERKIM Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya permukiman layak huni dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Persentase rata-rata capaian kinerja infrastruktur kawasan permukiman.
- 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat;
 - b) Persentase pemanfaatan penggunaan tanah.
- 3) Meningkatnya kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Persentase peningkatan rumah layak huni.
- 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a) Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah;
 - b) Nilai SAKIP Perangkat Daerah; dan
 - c) Nilai SPIP Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Jangka Menengah DINPERKIM Kabupaten Banyumas periode 2025 – 2029 tertera pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinperkim Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN							KET	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Misi: 4 Meningkatnya pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya pemerataan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berdaya saing Sasaran: Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel	Meningkatnya permukiman layak huni	Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0,998	0,998	0,998	0,999	0,999	1		
			Rasio Rumah Layak Huni	Angka	0,22	0,223	0,226	0,23	0,233	0,237		
			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	61,38	67	72,63	78,25	83,88	89,5		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50		
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65		
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75		
		Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	%	99,807	99,844	99,882	99,919	99,957	100,000		
			Persentase rata-rata kinerja penanganan kawasan permukiman	%	49,226	49,432	53,275	57,118	60,961	63,586		
		Misi: 2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah Tujuan: Menguatnya ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan Sasaran: Tertanganinya kemiskinan	Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	0,624	0,642	0,658	0,673	0,686	0,698	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat	%	100	100	100	100	100	100
Presentase pemanfaatan penggunaan tanah	%				48,5	56	63,5	71	78,5	86		

Sumber: DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025

3.2. Strategi

Strategi merupakan arah dan pendekatan yang ditempuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, permasalahan aktual, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Strategi ini menjadi landasan dalam penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi DINPERKIM Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Strategi dan Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
DINPERKIM Kab. Banyumas Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
		Penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan internal
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi
	Meningkatnya permukiman layak huni	Percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		Peningkatan kualitas dan penataan kawasan permukiman kumuh
		Penguatan kolaborasi dan pendanaan lintas sektor
		Penguatan perencanaan dan pengendalian pembangunan permukiman
		Penyediaan dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman
		Peningkatan kualitas data dan sistem informasi perumahan dan permukiman
		Penguatan kapasitas kelembagaan dan peran masyarakat
		Integrasi penanganan permukiman dengan mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan
	Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat	Percepatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		Pemutakhiran dan integrasi data perumahan
		Penguatan kolaborasi pendanaan dan kemitraan
		Peningkatan kualitas standar teknis rumah layak huni
		Integrasi program perumahan dengan pengentasan kemiskinan
		Penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi
		Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan rumah
		Penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksana
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan	Penguatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program
		Peningkatan kepastian hukum pemanfaatan tanah
		Percepatan sertifikasi aset dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan
		Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan
		Pemutakhiran dan integrasi data pertanahan
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia urusan pertanahan
		Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
		Penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pertanahan

3.3. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman dan arahan yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan tindakan dan pengambilan keputusan guna mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan selaras dengan tujuan serta sasaran jangka menengah yang ingin dicapai.

Arah kebijakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas dirumuskan sebagai penjabaran operasional dari strategi, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Kebijakan ini menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan disusun secara sistematis untuk memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan strategis dan implementasi program di lapangan. Melalui keterkaitan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang diambil mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja DINPERKIM Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya, hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DINPERKIM Kabupaten Banyumas untuk periode 2025–2029 disajikan secara ringkas dan terstruktur dalam Tabel 3.3 sebagai acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang berbasis kinerja melalui penguatan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan, didukung oleh ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan real time, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pencapaian hasil pembangunan
		Penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan internal	Memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pemanfaatan sistem pengawasan berbasis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			risiko dan teknologi informasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur	Meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur melalui pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, penguatan sistem manajemen talenta, serta penerapan merit system guna mewujudkan aparatur yang adaptif, berorientasi kinerja, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas
		Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengaduan masyarakat
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi yang terintegrasi, interoperabel, dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, guna meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas pengambilan keputusan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	Meningkatnya permukiman layak huni	Percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan alokasi dan efektivitas pendanaan, penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas sumber pembiayaan, serta penajaman basis data penerima manfaat agar intervensi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan
		Peningkatan kualitas dan penataan kawasan permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas dan penataan kawasan permukiman kumuh secara terpadu dan berkelanjutan melalui penanganan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas rumah layak huni, penataan lingkungan permukiman, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat berbasis data yang akurat dan terintegrasi
		Penguatan kolaborasi dan pendanaan lintas sektor	Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan alternatif dan inovatif guna memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan
		Penguatan perencanaan dan pengendalian pembangunan permukiman	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan permukiman melalui penguatan basis data yang akurat dan terintegrasi, penataan kawasan permukiman secara berkelanjutan, serta pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung penyediaan permukiman layak huni, aman, dan inklusif
		Penyediaan dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan rentan, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, serta pendekatan berbasis kebutuhan dan data yang terintegrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan kualitas data dan sistem informasi perumahan dan permukiman	Meningkatkan kualitas, akurasi, dan keterpaduan data perumahan dan permukiman melalui penguatan sistem pendataan yang terintegrasi, mutakhir, dan berbasis teknologi informasi, sebagai dasar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan intervensi perumahan dan permukiman yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan
		Penguatan kapasitas kelembagaan dan peran masyarakat	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, serta memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan tata kelola kelembagaan, dan perluasan kolaborasi berbasis kemitraan
		Integrasi penanganan permukiman dengan mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan	Mengintegrasikan penanganan dan pengembangan permukiman dengan upaya mitigasi bencana serta prinsip keberlanjutan lingkungan melalui perencanaan berbasis risiko, penerapan standar bangunan aman dan ramah lingkungan, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan kawasan permukiman yang tangguh, aman, dan berkelanjutan
	Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat	Percepatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Mempercepat rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui peningkatan cakupan dan kualitas penanganan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan sumber pendanaan, memperkuat basis data RTLH, serta meningkatkan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat
		Pemutakhiran dan integrasi data perumahan	Meningkatkan kualitas tata kelola data perumahan melalui pemutakhiran data secara berkala dan terstandar serta pengembangan sistem informasi perumahan yang terintegrasi lintas sektor, guna mendukung perumusan kebijakan, perencanaan program, dan penetapan intervensi penanganan perumahan dan permukiman yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan
		Penguatan kolaborasi pendanaan dan kemitraan	Mengoptimalkan kolaborasi pendanaan dan kemitraan pembangunan melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat, serta pemanfaatan berbagai sumber pendanaan alternatif guna meningkatkan kapasitas pembiayaan dan keberlanjutan pembangunan daerah
		Peningkatan kualitas standar teknis rumah layak huni	Meningkatkan kualitas standar teknis rumah layak huni melalui penyusunan, penerapan, dan pengawasan standar bangunan yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, guna mendukung peningkatan kualitas hidup dan penurunan kemiskinan
		Integrasi program perumahan dengan pengentasan kemiskinan	Mengintegrasikan program perumahan, khususnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan permukiman kumuh, dengan program pengentasan kemiskinan melalui penajaman sasaran rumah tangga miskin dan miskin ekstrem, sinergi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan data terpadu, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan
		Penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi	Meningkatkan penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemenuhan standar rumah layak huni dan aman bencana, serta penyediaan lokasi relokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat
		Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan rumah	Mendorong peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas rumah melalui penguatan partisipasi, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, serta pengembangan swadaya dan gotong royong yang didukung oleh fasilitasi pemerintah daerah
		Penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaksana	Meningkatkan efektivitas kelembagaan dan kapasitas pelaksana pembangunan melalui penguatan struktur organisasi, kejelasan peran dan kewenangan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara optimal dan berkelanjutan
		Penguatan monitoring, evaluasi, dan pengendalian program	Meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan melalui penguatan sistem pelaporan berbasis kinerja, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian hasil pembangunan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan	Percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui peningkatan cakupan dan kualitas intervensi secara terintegrasi, dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, memperkuat basis data dan sistem informasi perumahan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan guna mewujudkan hunian layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan
		Peningkatan kualitas dan penataan kawasan permukiman kumuh	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui penataan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan, mencakup peningkatan kualitas rumah layak huni, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, dengan dukungan data kawasan yang akurat dan terintegrasi
		Penguatan kolaborasi dan pendanaan lintas sektor	Memperkuat kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi sumber pendanaan pembangunan melalui peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat, guna memperluas cakupan intervensi pembangunan serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan program prioritas
		Penguatan perencanaan dan pengendalian pembangunan permukiman	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan melalui penguatan basis data permukiman, penataan kawasan berbasis kebutuhan riil, serta pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			perumahan guna mewujudkan permukiman yang layak huni, tertata, dan inklusif
		Penyediaan dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman	Meningkatkan ketersediaan dan akses masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan melalui penguatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta perluasan cakupan pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan secara terintegrasi dan tepat sasaran
		Peningkatan kualitas data dan sistem informasi perumahan dan permukiman	Meningkatkan kualitas, akurasi, dan keterpaduan data perumahan dan permukiman melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, mutakhir, dan berbasis spasial, guna mendukung perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kebijakan perumahan dan permukiman yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan
		Penguatan kapasitas kelembagaan dan peran masyarakat	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan memperkuat peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan
		Integrasi penanganan permukiman dengan mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan	Mengintegrasikan penanganan permukiman dengan upaya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan melalui perencanaan berbasis risiko, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta penguatan ketahanan permukiman terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian tujuan strategis, langkah operasional perlu dituangkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas.

Program merupakan himpunan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu oleh satu atau lebih perangkat daerah, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran program sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk konkret dari aktifitas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang mencerminkan tingkat pencapaian kinerja.

Adapun rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan DINPERKIM Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

- 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - c. Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
 - d. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

- 1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

- 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - a. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - b. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

- 1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

- 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - b. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 - c. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - d. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - e. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - f. Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - b. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
- 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - b. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - c. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 4) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- a. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

- 1) Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

7. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

- 1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

- 1) Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

9. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

- 1) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DINPERKIM Kab. Banyumas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
Misi: 4 Meningkatnya pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan Meningkatnya pemerataan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berdaya saing Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel			Rasio Permukiman Layak Huni		
				Rasio Rumah Layak Huni		
				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		
		Meningkatnya permukiman layak huni		Persentase rata - rata Kinerja Penanganan Kawasan Permukiman		
			Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
				Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah		
				Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik		
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
			Terlaksananya penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
				Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani		
				Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara		
				Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
			PSU Perumahan yang direncanakan penyediaannya	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Terlaksananya verifikasi dan penyerahan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
			PSU di Perumahan yang disediakan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
			Meningkatnya kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan dan ditata	Jumlah luas kawasan kumuh (sisu kumuh)	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Meningkatnya kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Jumlah luas kawasan kumuh (sisu kumuh)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Terlaksananya pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Kawasan permukiman kumuh yang dipugar	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan		Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat		
				Persentase pemanfaatan penggunaan tanah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
			Terlaksananya redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimal dan tanah absentee	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		
			Subjek dan Objek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penatagunaan tanah	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Persentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan		
				Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
				Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		
				Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		
			Terlaksananya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kab/kota	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya pengelolaan izin membuka tanah	Tersedianya tanah untuk masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
			terlaksananya penerbitan izin membuka tanah	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
			Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
			Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan daerah kabupaten	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya inventarisasi kasus pertanahan	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Rumah layak huni bagi masyarakat		Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni		
			Terlaksananya program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		
			Terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten / Kota	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Terlaksananya program pengembangan perumahan	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
				Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah		
			Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang teridentifikasi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			Terlaksananya Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang teridentifikasi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
			Kabupaten/Kota yang teridentifikasi			
			Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
			Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang dibentuk dan dilatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
			Rumah korban bencana yang dibangun dan direhabilitasi	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rumah Korban Bencana yang di Rehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
			Rumah korban bencana yang dibangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
				Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana		
				Pemukiman kembali bagi korban bencana		
			Rumah Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Kab/Kota yang dibangun	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni		
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		
			Terlaksananya Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
				Nilai SPIP Perangkat Daerah		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah		
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi		
				Nilai kematangan organisasi		
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan	Program, Kegiatan & Sub kegiatan	Ket
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan serta Pendanaan DINPERKIM Kab. Banyumas periode 2025 – 2030

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM Perangkat Daerah	Angka	90	90	8.702.316.407	95	9.101.917.235	95	9.995.109.365	95	10.151.032.000	95	10.293.146.000	95	10.404.311.000	95	10.420.957.000
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	95	97,57		95		95		95		95		95		95	
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	74	74		75		75,500		76		76,500		77		77,500	
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Nilai kematangan organisasi	%	47	47		48		49		49		49		49		49	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	105.848.724	100	40.987.750	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	100	100		100		100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	11.078.400	4	7.757.750	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	94.770.324	3	33.230.000	3	140.000.000	3	140.000.000	3	140.000.000	3	140.000.000	3	140.000.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	N/A	465.335.341	100	381.673.514	100	789.896.638	100	689.896.638	100	789.896.638	100	789.896.638	100	789.896.638

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
		Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	N/A	N/A		60		65		70		75		80		85	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.655.000	1	3.750.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	181.042.881	1	189.067.814	1	239.744.138	1	239.744.138	1	239.744.138	1	239.744.138	1	239.744.138
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	26.903.550	1	22.050.000	1	23.152.500	1	23.152.500	1	23.152.500	1	23.152.500	1	23.152.500
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	75	232.598.910	72	156.805.700	72	500.000.000	72	400.000.000	72	490.000.000	72	490.000.000	72	490.000.000
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3.000	5.481	17.135.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	100	100	108.890.500	100	67.436.000	100	170.000.000	100	370.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000	100	170.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	32.105.500	1	2.248.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	76.785.000	1	65.188.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000
X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	1		1	10.000.000	1	210.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.957.130.970	100	2.000.318.485	100	2.148.488.838	100	2.048.488.838	100	2.048.488.838	100	2.048.488.838	100	2.048.488.838

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan															
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	146.613.272	48	169.485.285	48	181.770.278	48	181.770.278	48	181.770.278	48	181.770.278	48	181.770.278	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.810.517.698	12	1.830.833.200	12	1.966.718.560	12	1.866.718.560	12	1.866.718.560	12	1.866.718.560	12	1.866.718.560	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	326.848.996	100	292.485.000	100	517.164.810	100	517.164.810	100	617.164.810	100	617.164.810	100	617.164.810	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	28	194.415.000	28	182.160.000	28	187.164.810	28	187.164.810	28	287.164.810	28	287.164.810	28	287.164.810	
X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	150	126	14.850.000	150	2.875.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140	113	90.375.600	140	53.990.000	140	100.000.000	140	100.000.000	140	100.000.000	140	100.000.000	140	100.000.000	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	27.208.396	2	53.460.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	5.738.261.876	100	6.319.016.486	100	6.179.559.079	100	6.335.481.714	100	6.477.595.714	100	6.588.760.714	100	6.605.406.714	
		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan															
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
		terhadap pengajuan anggaran (NPD)																	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	48	48	5.522.511.876	48	5.094.216.486	48	5.883.810.879	48	6.039.733.514	48	6.181.847.514	48	6.293.012.514	48	6.309.658.514	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	24	24	215.750.000	24	224.800.000	24	295.748.200	24	295.748.200	24	295.748.200	24	295.748.200	24	295.748.200	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	N/A	N/A		100,00	50.000.000	100,00	100.000.000	100,00	102.000.000	100,00	104.000.000	100,00	106.000.000	100,00	108.000.000	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah kegiatan ijin membuka tanah	Kegiatan	N/A	N/A		N/A	50.000.000	1,00	100.000.000	1,00	102.000.000	1,00	104.000.000	1,00	106.000.000	1,00	108.000.000	
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	N/A	N/A		1,00	50.000.000	1,00	100.000.000	1,00	102.000.000	1,00	104.000.000	1,00	106.000.000	1,00	108.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	N/A	N/A		100,00		100,00	100.000.000	100,00	102.000.000	100,00	104.000.000	100,00	106.000.000	100,00	108.000.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	N/A	N/A		1,00		1,00	100.000.000	1,00	102.000.000	1,00	104.000.000	1,00	106.000.000	1,00	108.000.000	
2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	N/A	N/A		1,00		1,00	100.000.000	1,00	102.000.000	1,00	104.000.000	1,00	106.000.000	1,00	108.000.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN	Persentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	N/A	N/A	N/A	100	15.255.000	100	100.000.000	100	102.000.000	100	104.900.000	100	107.600.000	100	108.900.000	

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
	TANAH ABSENTEE																	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi objek redistribusi tanah	Lokasi	N/A	N/A	N/A	1,00	15.255.000	1,00	100.000.000	1,00	102.000.000	1,00	104.900.000	1,00	107.600.000	1,00	108.900.000
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1,00	15.255.000	1,00	100.000.000	1,00	102.000.000	1,00	104.900.000	1,00	107.600.000	1,00	108.900.000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	%	100	100	133.135.000	100,00	197.321.450	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000
		Persentase bidang tanah perumahan yang disertifikatkan	%	100	100	16.886.700	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
		Pembangunan Fasilitas Umum																
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah PSU Perumahan yang disertifikatkan	Sertifikat	N/A		16.886.700	20,00	197.321.450	20,00	400.000.000	20,00	400.000.000	20,00	400.000.000	20,00	400.000.000	20,00	400.000.000
		Jumlah Bidang Tanah yang dikonsolidasi tahun n	Bidang	N/A		133.135.000	60,00		100,00		100,00		50,00		50,00		50,00	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	16.886.700	1,00	46.155.750	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	133.135.000	1,00	151.165.700	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000	1,00	250.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	N/A		138.623.000	42,69	8.667.083.730	42,95	6.215.782.000	43,21	6.341.900.000	43,47	6.522.600.000	43,73	6.696.100.000	43,99	6.781.100.000
		Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	N/A		5.904.149.520	44,22		47,52		50,83		54,13		57,43		60,73	
		Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik	%				41,61		43,21		44,82		46,42		48,03		49,63	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
		Sarana dan Utilitas Umum)																
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang diserahkan	Dokumen	33	33	138.623.000	10,00	8.667.083.730	10,00	6.215.782.000	10,00	6.341.900.000	10,00	6.522.600.000	10,00	6.696.100.000	10,00	6.781.100.000
		Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani	Km	N/A	N/A	5.904.149.520	6,35		6,35		6,35		6,35		6,35		6,35	
		Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	Meter				2.055,00		2.055,00		2.055,00		2.055,00		2.055,00		2.055,00	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	20	17	2.895.000	10,00	1.250.000	10,00	35.000.000	10,00	40.000.000	10,00	40.000.000	10,00	40.000.000	10,00	40.000.000
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	20	33	60.430.000	2,00	32.437.500	2,00	60.000.000	2,00	75.000.000	2,00	80.000.000	2,00	80.000.000	2,00	80.000.000
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	33	33	75.298.000	10,00	5.000.000	10,00	60.000.000	10,00	75.000.000	10,00	80.000.000	10,00	80.000.000	10,00	80.000.000
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	99	80	5.904.149.520	80,00	8.628.396.230	80,00	6.060.782.000	80,00	6.151.900.000	80,00	6.322.600.000	80,00	6.496.100.000	80,00	6.581.100.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab yang ditangani	%	N/A		259.900.000	55,41	130.000.000	19,39	1.315.000.000	38,77	1.341.600.000	58,16	1.379.800.000	77,55	1.416.500.000	100,00	1.434.400.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Ha	N/A	N/A	-	51,58	10.000.000	41,58	15.000.000	31,58	15.000.000	21,58	15.000.000	11,58	15.000.000	N/A	15.000.000

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	N/A	N/A	N/A	50,00	10.000.000	50,00	15.000.000	50,00	15.000.000	50,00	15.000.000	50,00	15.000.000	50,00	15.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan kumuh (siswa kumuh)	Ha	N/A		259.900.000	51,58	120.000.000	41,58	1.300.000.000	31,58	1.326.600.000	21,58	1.364.800.000	11,58	1.401.500.000	N/A	1.419.400.000
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	N/A	N/A	259.900.000	2,00	120.000.000	3,00	300.000.000	2,00	200.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	N/A	N/A	N/A	15,00		15,00	1.000.000.000	15,00	1.126.600.000	15,00	1.264.800.000	15,00	1.301.500.000	15,00	1.319.400.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	%	84,57		21.493.180.628	85,10	7.889.966.762	85,65	14.000.000.000	86,22	14.284.200.000	86,80	14.691.200.000	87,40	15.081.900.000	88,02	18.273.400.000
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	N/A			14,90		14,35		13,78		13,20		12,60		11,98	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah RTLH yang Ditangani sampai dengan Tahun n	Unit Rumah	25,752		21.493.180.628	27,25	7.889.966.762	28,90	14.000.000.000	30,70	14.284.200.000	32,65	14.691.200.000	34,75	15.081.900.000	37,00	18.273.400.000
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	Unit Rumah	1386	1.387	21.493.180.628	1.500,00	7.889.966.762	1.650,00	14.000.000.000	1.800,00	14.284.200.000	1.950,00	14.691.200.000	2.100,00	15.081.900.000	2.250,00	18.273.400.000

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
	Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki																
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%	100		315.772.400	100	723.333.359	100	4.845.000.000	100	4.920.582.000	100	4.989.470.000	100	5.043.356.000	100	5.051.425.000
		Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	%	100			100		100		100		100		100		100	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	N/A		25.852.400	2	127.078.075	6	2.350.000.000	6	2.350.000.000	6	2.400.000.000	6	2.450.000.000	6	2.450.000.000
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	N/A	100,00	723.333.359	100,00	4.845.000.000	100,00	4.943.300.000	100,00	5.084.100.000	100,00	5.219.300.000	100,00	5.285.500.000
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	N/A	N/A	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	N/A	N/A	2,00	127.078.075	6,00	2.350.000.000	6,00	2.400.000.000	6,00	2.500.000.000	6,00	2.600.000.000	6,00	2.650.000.000
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1,00		1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
	bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi																
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	25.852.400	1,00		1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000	1,00	300.000.000
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A		1,00	550.000.000	1,00	550.000.000	1,00	550.000.000	1,00	550.000.000	1,00	550.000.000
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Kegiatan	N/A		38.780.000	2,00	62.923.432	2,00	395.000.000	2,00	443.300.000	2,00	484.100.000	2,00	519.300.000	2,00	535.500.000
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Orang	40	40	10.180.000	44,00	3.025.000	47,00	195.000.000	47,00	243.300.000	47,00	284.100.000	47,00	319.300.000	47,00	335.500.000
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	1	1	28.600.000	2,00	59.898.432	6,00	200.000.000	6,00	200.000.000	6,00	200.000.000	6,00	200.000.000	6,00	200.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	N/A		240.000.000	17,00	530.000.000	55,00	1.900.000.000	55,00	1.900.000.000	55,00	1.900.000.000	55,00	1.900.000.000	55,00	1.900.000.000
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	2	2	30.000.000	5,00	75.000.000	15,00	300.000.000	15,00	300.000.000	15,00	300.000.000	15,00	300.000.000	15,00	300.000.000
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah	6	6	210.000.000	12,00	455.000.000	10,00	800.000.000	10,00	800.000.000	10,00	800.000.000	10,00	800.000.000	10,00	800.000.000

Program,Kegiatan & Sub kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
				Baseline 2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				T	R	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp
		Kabupaten/Kota yang Terbangun																
		Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah				N/A		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
		Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah				N/A		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Unit Rumah	N/A	N/A	N/A	N/A		20,00	800.000.000	20,00	800.000.000	20,00	800.000.000	20,00	800.000.000	20,00	800.000.000
		Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni					20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan serah terima rumah terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah	Kegiatan	1	1	11.140.000	1,00	3.331.852	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000	1,00	200.000.000
1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A		1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	11.140.000	1,00	3.331.852	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama DINPERKIM Kab. Banyumas 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya kawasan permukiman yang layak, tertata, dan berkelanjutan serta penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel		Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0,998	0,998	0,998	0,999	0,999	1	
		Rasio Rumah Layak Huni	Angka	0,22	0,223	0,226	0,23	0,233	0,237	
		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	61,38	67	72,63	78,25	83,88	89,5	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektifitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65	
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,51	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75	
	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	%	99,807	99,844	99,882	99,919	99,957	100,000	
		Persentase rata-rata kinerja penanganan kawasan permukiman	%	49,226	49,432	53,275	57,118	60,961	63,586	
	Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	%	0,624	0,642	0,658	0,673	0,686	0,698	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase PSU Perumahan yang bersertifikat	%	100	100	100	100	100	100	
		Persentase pemanfaatan penggunaan tanah	%	48,5	56	63,5	71	78,5	86	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci DINPERKIM Kab. Banyumas Tahun 2025 -2030

No	Program	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 IKM Perangkat Daerah	Angka	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
		2 Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Angka	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
		3 Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	
		4 Nilai Kematangan Organisasi	Angka	48,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	
		5 Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1 Presentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	42,69	42,95	43,21	43,47	43,73	43,99	
		2 Persentase PSU Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	44,22	47,52	50,83	54,13	57,43	60,73	
		3 Persentase Jalan Lingkungan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	41,61	43,21	44,82	46,42	48,03	49,63	
		4 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab yang ditangani	%	55,41	19,39	38,77	58,16	77,55	100	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1 Persentase Cakupan Rumah Layak Huni	%	85,1	85,65	86,22	86,8	87,4	88,02	
		2 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	14,9	14,35	13,78	13,2	12,6	11,98	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 Persentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	
		2 Persentase tersedianya rumah layak huni bagi warga terdampak relokasi akibat program pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	

No	Program	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1	Prosentase tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	1	Prosentase tanah yang terfasilitasi redistribusi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		3	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4	Persentase bidang tanah yang dikonsolidasikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		5	Prosentase jumlah bidang tanah perumahan yang disertifikatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		6	Persentase ketersediaan Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, September 2025

Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas



Sakty Suprabowo, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911231997031001